TAHUN 2026

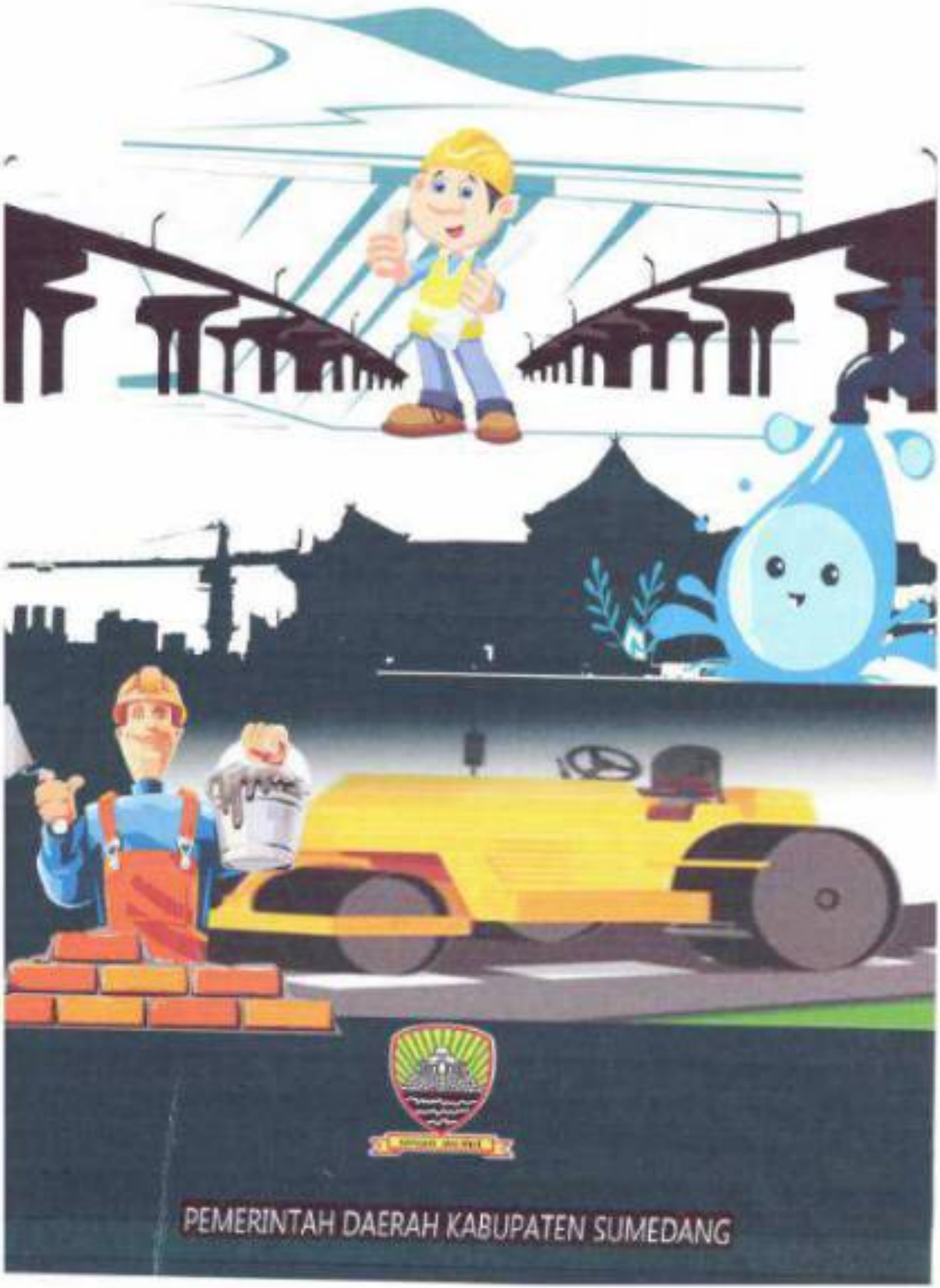

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata ala atas tersusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025. Penyusunan renja ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2025 – 2029.

Rencana Kerja Dinas PUTR Kabupaten Sumedang dalam prosesnya mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra SKPD. Oleh karena itu penyusunan renja ini dapat dikerjakan secara stimultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang menyusun rancangan memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju . Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah ; dan
2. Hasil Pelaksanaan kinerja renja perangkat daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

Hasil perumusan rancangan akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang disajikan dan memuat:

a) Pendahuluan;
b) Hasil evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun lalu;
c) Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
d) Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
e) Penutup.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang telah disempurnakan berdasarkan surat edaran kepala Daerah / Bappppeda, penyempurnaan yang mencakup Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran pada rancangan RKPD. Rumusan kegiatan alternatif dan atau baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Bappppeda dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Sumedang, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2026 dapat dijadikan sebagai acuan yang diharapkan dapat disempurnakan kembali pada penyusunan rencana kerja untuk tahun selanjutnya.

Sumedang, Juli 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN SUMEDANG

Drs. ANDRI INDRA WIDIANTO, M.T., M.Sc

NIP. 19730805 [illegible]92021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa seluruh perangkat daerah harus menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang untuk periode 1 (satu) tahun dan Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan Rencana Kerja

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJD) Kabupaten Sumedang dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sangat ditentukan oleh kemampuan dinas dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting dinas, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dilakukan dengan pengesahan oleh Bupati Sumedang selaku kepala daerah, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang menetapkan renja untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2026.

Perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2026 merupakan tahun kedua perencanaan dari pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2030 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 selain mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga mengacu kepada Renstra Dinas PUTR Tahun 2025 - 2030.

Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026 perlu disusun yang selanjutnya akan disempurnakan setelah melalui proses verifikasi, evaluasi dari tim Bappopeda selain itu penyempurnaan dilaksanakan setelah melalui proses Forum Perangkat Daerah.

Penyusunan Dokumen Renja Dinas PUTR Kabupaten Sumedang sudah mengacu kepada Permendagri 90 tahun 2019 dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu juga indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sudah mengalami pemutakhiran kembali.

Sumedang telah dijelaskan sebelumnya diatas bahwa penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting dinas, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten. Ada pun pencapaian kondisi kinerja terakhir akhir periode renja sampai dengan triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sebesar 23,01%.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang – undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nommor 105);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);

28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

29. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005 -2025;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2038;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11)

49. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2014 Nomor 40);

50. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

51. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026;

53. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026;

54. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 611/KEP.345-DBMSDA/2015 Tentang Daerah Irigasi Dan Areal Sawah Tadah Hujan Di Wilayah Kabupaten Sumedang;

55. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 375 Tahun 2024 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten dan jalan desa

1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan

Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dilakukannya penyusunan Renja Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 sangat penting peranannya sebagai penampung kebijakan yang bersifat teknoratik yang berasal dari perencanaan SKPD selain itu penyusunan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026 memuat dasar pertimbangan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai triwulan tiga tahun n-1.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 memiliki tujuan sebagai berikut :

tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang selama tahun 2026;

2) Memasukkan program/kegiatan yang terdapat di rencana kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUAPPAS) Tahun 2026;

3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

4) Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;

5) Diperolehnya atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang tahun 2026;

6) Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sumedang Tahun 2026, sebagai dasar dari penyusunan APBD Tahun 2026 Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang , proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang , keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan dokumen RKPD dan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Lalu (2024)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang 2024;

2.1.1 Bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2024 dan Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 s.d. Triwulan II.

Kabupaten Sumedang;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Bab III: Tujuan, Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang yang diambil dari tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2025 -2030. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup

BAB II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai acuan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Renja Tahun 2026 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2026. Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 telah dilakukan secara efektif serta dalam koridor kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Hasil evaluasi terhadap seluruh laporan triwulanan dari Kepala SKPD Khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disampaikan kepala dinas PUTR kepada kepala Bappppeda untuk memberi gambaran dan menyatakan bahwa realisasi capaian indikator kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD telah sesuai atau belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 berikut dengan penjelasan tentang rekomendasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kepala SKPD dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan/atau menjadi bahan penyusunan rencana periode berikutnya.

Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Tahun 2026 adalah dengan pendekatan evaluasi setiap indikator program dan kegiatan dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 menjadi ukuran tingkat kinerja setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan termasuk dari Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dijadikan program prioritas dalam rangka upaya menembak sasaran target RPD Pemerintah Kabupaten Sumedang Periode 2024-2028.

Untuk gambaran capaian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sampai dengan Tahun 2024

No. urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Kualisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=6+12	
1	Meningkatnya kapasitas kapasitas dan kapabilitas, birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP perangkat daerah	A KASI GORI	32,153,671,621	% 27.32	4,485,111,198	29.25	1,783,840,320	26.27	1,190,090,433	21.17	6,390,715,633	100	13,854,561,302.00	100.00	13,858,347,502

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2023)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyusunan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dok	103,654,500	30 %	18,987,100	21 per sen	13,054,100	per sen	-	83.00 per sen	80,512,800	100	139,154,800.00	95.18	135,534,800
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	4.00 dok	50,874,500	50 %	26,987,100	per sen	7,054,100	50.00 per sen	-	per sen	15,912,000	100	10,064,060.00	100.00	93,964,000

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Belanja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BELANJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Belanja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1.00 dok	12,127,500			dok		1 dok		(1)dok	12,127,500	100	15,128,500.00	100.00	15,128,500
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1.00 dok	5,640,500			dok		dok		1 dok	5,640,500	100	5,640,500.00	100.00	5,640,500
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	2.00 dok	7,560,000	% 50		dok	1,500,000	1.0 0 dok		1 dok	6,060,000	100	7,560,000.00	100.00	7,560,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	1.00 dok	12,072,000	25 %	0.00	25 dok	10,500,000	62 dok 11		38 dok	41,722,000	100	52,022,060.00	100.00	52,022,000

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
														-		0,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37 Lap	17,884,599,002	25 %	3,725,130,485	25	4,410,772,282	25	3,948,820,368	25	3,227,684,382	100	17,361,430,117.00	100.00	17,363,420,317
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	184 org	17,669,399,002	25 %	3,726,551,485	25 %	4,451,641,282	25 %	3,948,930,368	25	5,206,141,382	100	17,327,267,717.00	100.00	17,327,267,717

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2020)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Evaluasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelaksanaan Perekaudahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (MPE	Jumlah Laporan Perhitungan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (MPD	12 dok	21,470,000	25 %	5,367,500	25 %	4,293,000	25 %		25	11,250,000	100	21,470,000	100 .00	21,470,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran (SPP)		12 dok	22,182,400	25 %	5,593,600	25 %	5,450,000	25 %		25	10,213,000	130	26,582,600 .00	100 .00	26,582,600

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun/ 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	7 lap	19,712,700	0	-	0	3,000,000	50	6,812,500	50	3,940,200	100	16,757,700.00	100.00	19,712,700
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 dok	6,982,500	0	-	0	-	50.00 prosen	940,500	50	6,210,000	100	6,982,500.00	000.00	6,982,500

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Evaluasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	12,776,000	0		0	3,900,000	12 %	6,166,000	69	2,609,200	100	12,771,200.00	100.00	12,771,200
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	10 lap	10,000,000	-	-		-	% 100.00	10,000,000		-	100 %	- 10,000,000.00	100.00	10,000,000

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	40.0 dok 0	33,000,000	-				40. dok 00	33,000,000		-	100 %	16,005,000.00	100.00	99,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 lap	783,726,860	28 % 44	318,195,500	70. 87	176,550,000	89. 89	333,242,639	10. 00	177,816,100	VI	785,655,639.00	99. 14	783,629,639

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 pkt	258,830,400	10.90 pcs/unit	35,057,100	18.45	47,771,700	11.30 pcs/unit	137,903,400	33.00	73,335,200	91	258,830,400	90.82	258,830,400
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 pkt	50,000,000	10.00 pcs/unit	6,507,800	25.10	14,040,500	11.80 pcs/unit	17,887,200	28.00	9,055,000	130	50,000,000	99.89	50,000,000

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 pkt	100,001,000	33.00 per sem	9,800,000	23.62	24,000,000	90.73 per sem	66,360,000	1	10,191,500	100	109,991,600.00	83.15	109,991,600
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 pkt	90,078,400	90.56 per sem	22,428,100	23.16	19,801,800	95.71 per sem	31,758,100	33.00	23,050,400	100	90,078,400.00	86.11	90,078,400

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disebarkan	59 dok	28,964,000	25.00 persen	18,741,000	32.47	12,494,000	25.00 persen	16,741,000	33.00	24,988,000	100	74,964,000.00	59.47	74,964,000

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah/Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	155,854,000	25.097 orang	60,777,333	25.00	18,000,000	36.297 orang	71,582,333	17	40,366,333	100	189,748,370.00	99.53	535,745,370
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10 laporan	955,488,000	% 60.00	208,350,000	34.16	413,500,000	23.50	7,200,000	4	251,184,600	130	930,734,600.00	95.46	930,734,600

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	320 unit	295,906,000	40	109,850,000	0.00	-	40 %	82,000	20	15,000,000	100	294,300,000.00	140.00	596,600,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	641,618,182	30	30,000,000	15 unit	194,375,000		-	15	61,194,600	100	641,119,600.00	160.00	641,119,600
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	220,850,000	-		80.47	215,425,000	3	4,356,000	70	25,000,000	160	200,775,000.00	559.47	200,775,000
																0.00	-

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Sampai Peringkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 laporan	3,601,215,000	25	233,945,723	25	495,588,738	25	415,896,385	25	498,246,935	100	1,199,611,767.00	100.00	3,599,53 3,767

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	199,760,000	25 %	30,043,712	25 %	32,059,518	25 %	42,356,720	25	65,472,531	100	168,032,961.00	100.00	168,032,961
		Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	1,442,450,000	25 %	173,690,000	25 %	432,287,200	25 %	435,495,600	25	434,812,000	100	1,441,598,800.00	100.00	1,441,598,800

No Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																0,00		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	60 laporan	1,021,287,233	30 laporan	66,400,000	40 %	328,160,000	20 %	442,107,900	11	190,489,600	110	1,023,166,500.00	99,74	1,891,363,500

Kode	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	321,237,510	15 unit 10 unit	64,400,000	24 unit 81	80,200,000	44 unit 35 unit	143,465,810	33	33,170,000	100	123,290,810.00	100 -13	325,208,000

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Yang Peroangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisikan (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BENDA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Benstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pertimbangan Alat Berat	Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan dioperasikan Pemeliharaan	10 unit	220,000,000	unit		10.00	133,360,000	1 Unit	22,400,000		50,251,000	100	219,875,000	100.00	219,875,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50,300,000	unit		10.00	13,000,000	40 Unit	24,799,000		9,200,000	100	49,999,000	100.00	49,999,000

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2026)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	430.000.000	unit 5		6.0 unit 0 5	95.000.000,00	12 unit 7	246.895.000		20.000.000	100	420.089,000.00	160 80	839.095.000

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisikasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas lahan yang terairi (Ha)	Ha 2545 4.31	55,887,000,000	% 25.00	371,958,560	13.56	3,489,769,700	44.04	33,698,952,700	22	6,854,567,300	100.00	21,413,158,460.00	100.00	21,413,158,460
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Total Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik	km 25	23,895,600,000	20	371,958,560	19	3,489,769,700	44	33,698,952,700	22	6,854,567,300	100	21,413,158,460.00	99.63	21,413,158,460

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	2 km	2,035,500,000	25 %	10,588,500	20% 33	731,899,900	45 %	1,625,355,000	15	905,830,000	100	5,364,674,400.00	100 % 33	5,364,674,400
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	11.1 37 km	16,709,500,000	20 %	12,778,500	35% 62	2,409,365,000	50 %	8,186,715,360	14	1,504,144,500	100	16,534,644,500.00	99% 62	30,534,644,500

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2019)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEWA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km 1.210	700,000,000	% 40 (K)	309,000,000	7.5 K	54,770,000	% 45	213,871,040	1	35,783,400	100	672,567,350.00	99.34	672,567,350
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dok 9	880,000,000	% 10 (K)	18,018,000.00	10 K1	95,337,800	% 36	464,997,750	43	284,508,600	100	862,372,150.00	99.90	862,372,150
																0.00	

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang memdapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	82.22 Persen	11,103,428,025	20 %	82,794,000	30 %	272,784,000	34 %	4,065,964,600	16.00	10,542,275,325	100	14,891,793,015.00	100.00	14,891,792,925

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan	1,60 SR 0	33,595,428,933	20	30,756,000	30	272,784,000	24	4,206,064,600	16,00	30,342,275,333	100	14,851,790,655.00	100,00	14,851,790,655
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM yang disusun	2 dok	200,000,000	% 20,00	1,354,600	40,00	1,813,400	% 40,00	130,710,100	10,00	1,950,000	100	197,838,100.00	100,00	197,838,100

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang ditinjau/ (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum SSPAMS Jaringan Perpipaan yang dibangun	11 liter/detik	21,101,420,000	% 20.00	5,405,400	30.00	270,371,000	% 28.07	3,915,240,630	22.90	10,538,125,315	100	14,693,952,945.00	100.07	14,659,552,615
														-		0.00	

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Belanja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BELANJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Evaluasi Kinerja dan Anggaran Belanja Perangkat Daerah n/4 Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Belja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi	56.1 2	persen	10	%	12,010,780	30	22,801,300	30	2,195,390,600	30.00	7,102,626,700	100	10,091,389,300.00	100.33	10,091,389,300
		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah rumah tangga yang terlayani	97	RT	20	%	12,010,780	30	22,801,300	27	2,700,308,300	23	7,102,626,700	100	10,091,389,300.00	100.33	10,091,389,300

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyelesaian Sub Sistem Penyelenggaran Air Limbah Domestik SPALD Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	57 67	15,445,371,700	% 20. 00	12,959,700	30. 00	22,991,300	% 27. 21	2,705,169,400	13	7,562,628,700	330	10,393,369,340.00	302 .33	93,959,889,300

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2023)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rancangan Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	57.5 0 persen	3,123,000,000	% 20	60,813,700	30	170,165,100		929,070,700	00.0	316,230,400	110	1,885,420,500.00	160.00	5,885,429,500

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan (pmMendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	410 Unit	1,035,000,000	20 %	65,813,700	30	176,105,100	30	629,270,700	20	916,236,800	100	1,085,426,300.00	100	1,085,426,300

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2019)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Evaluasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	
				X	Rp	X	Rp	X	Rp	X	Rp	X	Rp	X	Rp	X	Rp
		Pengadvokasian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diadvokasikan	1 Bangunan gedung	565,000,000	15.50 %	4,540,000	20	15,720,000	40.52 %	270,692,700	17	277,717,900	100	277,934,700.00	99.22	277,934,700

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 2020

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Belja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Pendat Teknis TPT, Pendik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Pendat Teknis TPT, Pendik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 dok	910,000,000	% 23.00	58,964,700	30	160,170,000	% 23.96	249,628,000	16.900	38,518,300	100	507,436,000	99,00	507,436,000

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (AKHIR Tahun)/pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
																0,00	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kumulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	10 Unit	11,269,377,010	20 %	10,818,000	30 %	746,112,600	40 %	4,323,364,153	4	6,107,163,590	100	10,883,860,343.00	100.00	10,883,860,943
		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	4 Unit	11,269,377,010	20 %	10,818,000	30 %	746,112,600	40 %	4,323,364,153	4	6,107,163,590	100	10,883,860,343.00	100.00	10,883,860,943

No. Urut	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Perkotaan, Kawasan Sistem Permukiman Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Perkotaan, Kawasan Sistem Permukiman Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	21 Unit	68,339,577,053	20.00 %	6,321,350	30	709,760,000	50.00 %	3,321,054,610		5,103,354,700	100	10,295,680,240.00	100.00	85,737,888,249
		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis/Utama di Kabupaten/Kota	1 Dok	670,000,000	20.00 %	6,456,300	30	6,170,700	42.22 %	102,805,000	7	147,266,900	100	663,186,750.00	99.72	663,186,750

Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		PENANGGUNG JAWAB
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														0.00		0.00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	62.11 Persen	62,043,397,705	20.90	300,650,500	32.50	1,503,875,246	30.80	4,496,851,474	18	13,513,370,258	100.00	59,842,427,428.00	100.00	59,842,427,428	100.00	94.03	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten/ kota yang mantap	681.133 Km	63,043,397,705	20.00	300,650,500	32.58	1,503,875,246	30.90	4,430,851,474	17	13,503,370,258	100	59,842,427,428.00	100.00	59,842,427,428	100.00	94.03	

Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah/Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		PENANGGUNG JAWAB
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan jaringan jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan jaringan jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan jalan dan jembatan yang Disusun	0 dok	3,388,414,500	25.00	% 30,318,709	30.00	49,400,900	30.00	347,725,400	20	1,067,741,810	100	1,297,234,990.00	100.00	1,297,234,990	100.00	93.69	
Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 jembatan	8,049,747,000	25.00	%	50	-	30	1,971,794,479	20	6,440,359,635	100	8,433,844,114.00	100.00	8,433,844,114	100.00	97.59	
Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan kabupaten yang direkonstruksi	1.23 Km	10,430,380,895	25.00	%	30	15,044,600	30	246,308,390	20	9,239,452,110	100	9,313,004,910.00	100.00	9,313,004,910	100.00	93.29	

Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		PENANGGUNG JAWAB
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang Dipelihara Secara berkala	2.52 km	8,230,680,000	20.00 %	10,817,300.00	80	230,410,000	80	44,384,000	20	6,587,246,928	100	8,912,855,208.00	100.00	8,912,855,208	100.00	97.06	
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 jembatan	1,125,000,000	20.00 %	8,750,000	80	7,957,480	80	355,472,800	20	811,653,615	100	981,875,623.00	100.00	981,875,623	100.00	87.26	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan/Jembatan yang Diamati Kondisinya	670 km	670,000,000	20.00 %	14,561,300	50	436,142,862	80	46,889,000	20	160,173,500	120	655,756,362.00	100.00	655,756,362	150.00	97.87	
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi	21.1 km	21,032,200,000	20.00 %	40,775,300	30	108,985,385	30	987,161,995	20	21,123,112,654	100	22,319,049,374.00	100.00	22,319,049,374	100.00	85.21	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kabupaten yang dipelihara secara rutin	55 Km	8,000,000,000	20.00 %	171,355,690.00	30	434,334,000	30	413,779,160	20	6,044,531,049	100	7,330,813,199.00	100.00	7,330,813,199	100.00	94.09	
														0.00		0.00		

Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Kaitkan Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		PENANGGUNG JAWAB
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	72,7 7 persen	625,000,000	27	61,234,300	33	200,797,800	23	191,789,600		177,816,000	100	192,577,800.00	100.00	592,577,800	100.00	94.81	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di setiap Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis analis	111 org	400,000,000	30	10,540,000	40	172,995,800	20	142,191,000	21	69,568,000	101	389,317,800.00	100.00	389,317,800	100.00	97.33	
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang dilatih	111 org	400,000,000	20.00	10,500,000	40	172,945,800	20	142,191,000	21	53,180,000	100	389,317,800.00	100.00	389,317,800	100.00	97.33	

Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		PENANGGUNG JAWAB
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jasa Analisis (APS) Mengikuti Peraturan																	
														0.00		0.00		
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI DAERAH/PROVINSI/KOTA	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi	0 dok	75,000,000	40 %	32,811,200	50 %	11,938,600	10 %	2,000,000		17,950,000	100	64,300,000.00	100.00	64,300,000	100.00	86.00	
Penyelesaian Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Dipelihara	1 dok	75,000,000	40.00	32,811,200	38	11,938,600	88	2,000,000		17,950,000	100	64,300,000.00	100.00	64,300,000	100.00	86.00	

Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		PENANGGUNG JAWAB
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														5,00		3,60		
PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah penyedia yang diverifikasi kewenangan pengawasannya dalam kecakapan konstruksi	97 proyek	110,000,000	30 proyek	15,023,100	80	35,859,300	20	47,197,000		46,706,000	130	138,790,000.00	100,00	138,790,000	100,00	92,51	
Pengawasan dan Pelaku Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dievaluasi Tertib Usaha	50 badan usaha	153,000,000	20,00	15,023,100	80	35,859,300	30	47,197,000		46,706,000	130	138,790,000.00	100,00	138,790,000	100,00	92,51	
Program Penyelenggaraan Pelatihan Baang	Persentase keterwadilan RTK	50 peniar.	350,000,000	10 persen	14,870,100	50 persen	191,690,010	20	104,951,268		343,998,191	130,00	653,820,977	100,00	653,820,977	100,00	93,26	

Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		PENANGGUNGJAWAB
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	100 persen	300,000,000	17.00 Persen	20,281,500	4.00 Persen	25,801,600	60	26,797,000		11,904,500	101.00	90,871,260	100.00	90,871,260	100.00	90.07	
PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH ETRW DAN RENCANA RINCI TATA RUANG RTR KABUPATEN/KOTA	Jumlah rancangan peraturan kepala daerah RDTR	4 dok	100,000,000	- %	-	- %	-	1	-	2	148,447,100	101	148,447,100.00	100.00	148,447,100	100.00	88.86	
evaluasi kesesuaian dalam rangka Pelaksanaan Perizinan Ruang	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemda/Perkot a sesuai RTRW Kabupaten/Kota	2 dok	150,000,000	%						2	148,447,100	100	148,447,100.00	100.00	148,447,100	100.00	99.05	
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR	1 dok	150,000,000	33 %	- 16,870,500	50 %	193,690,018	1	104,353,268		193,653,091	100	104,373,877.00	100.00	104,373,877	100.00	93.78	

Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 3024 (%)		PENANGGUNGJAWAB
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kabupaten/Kota																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan PPID Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan PPID Kabupaten/Kota	4 Dok	550,000,000	10 %	14,870,500	50	153,430,000	3	104,352,250		150,843,000	100	504,373,877.00	100.00	504,373,877	100.00	91.79	
														0.00		0.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruanguntuk investasi dan pembangunn	44 Dok	330,000,000	17 dok	20,285,000	4	29,865,600	2	28,787,000		11,956,400	100	90,875,100.00	100.00	90,875,100	100.00	90.87	

Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kabupaten														
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	24 Dok	60,000,000	17.00	8,550,650	4.02	15,296,700	2	8,465,160	1	7,510,890	100.00	41,793,200.00	100.00	41,793,200.00
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen (dokumen) program pemanfaatan ruang	10 dok	50,000,000	24.00 %	11,727,000	4	10,648,300	2	20,102,500	10	6,423,100	100	47,082,900.00	100.00	47,082,900.00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					23.00 %		28.26 %		16.89		25.53		100.00	143,344,777,100	100.00	101,945,777,933
Predikat Kinerja																

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya *):																	

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 triwulan IV, diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Lampiran.

2.1.1 Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 s.d. Triwulan II

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 merencanakan 8 program, 21 kegiatan, dan 79 Sub kegiatan, selanjutnya dalam APBD Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 8 program, 21 kegiatan, dan 54 sub kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2025, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PUTR Kabupaten Sumedang dan Pencapaian Renstra Dinas PUTR Kabupat
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE... AN PER YA
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								90,609,740,000	6.33	5,116,294,385			6.33

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE A PD Y.
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Interval perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP perangkat daerah	A	KATEGORI	22,192,671,621	100.00	21,856,961,562	A	KATEGORI	22,123,372,617	24.01	5,311,593,545	-	-	24.0
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.00	dok	129,664,500	90.52	128,154,800	30.00	lap	195,823,900	19.56	38,702,000	-	-	19.5

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE A PD Y.
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	4.00	dok	50,074,500	100.00	50,064,000	4.00	dok	57,684,700	95.89	20,702,000	-		95.8
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	2.00	dok	10,227,500	100.00	15,128,500	2.00	dok	6,742,500	-				-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1.00	dok	5,840,500	100.00	5,840,500	2.00	dok	3,138,200	-				-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	dok	7,500,000	100.00	7,500,000	1.00	dok	3,617,900	-				-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE A PD Y.
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan kinerja SKPD	15.00	dok	52,072,000.00	100.21	52,072,000	12.00	lap	34,600,600.00	-				-
							0.00	-								-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.00	lap	17,694,592,002	100.00	17,365,420,117	36.00	dok	18,174,286,188	26.53	4,832,726,310	-	-	26.5
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji	184.00	org	17,650,935,602	100.00	17,327,267,717	184.00	org	18,166,825,148	26.60	4,832,726,310	-		26.6

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AK PD Y
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	k
			dan Sunjangan ASN													
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00	dok	21,470,000	100.00	21,470,000	12.00	dok	3,358,900	-				-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00	dok	33,192,400	100.00	16,682,400	12.00	lap	4,182,100	-				-
							0.00	-								-

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG 2026

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE... A... PD... Y...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	7.00	lap	19,757,700	100.00	19,757,700	7.00	lap	20,629,900	-	-	-	-	-
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	5.00	dok	6,982,500	100,00	6,982,500	5.00	dok	3,926,900	-	-	-	-	-

DINAS PENDIDIKAN UNTUK
DAN TATA RUANG 2026

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AP PER YA
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	13.00	lap	12,775,200	100.00	12,775,200	13.00	lap	18,561,700	-		-		-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						56.00	lap	7,117,103	-				
							0.00	-								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE... AI... PE... Y...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	10.00	lap	10,000,000	100.00	10,000,000	10.00	lap	10,613,500	-	-	-	-	-
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	40.00	dok	10,000,000	100.00	10,000,000	2.00	dok	10,613,500	-				
							0.00	-								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Berbsis Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE Ak PD Ta
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	k
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.00	lap	789,726,900	98.16	783,615,078	10.00	lap	980,707,950	30.39	179,539,130	-	-	30.3
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1.00	pkt	258,839,450	99.82	258,839,450	1.00	pkt	196,146,000	30.81	38,981,400	-		30.8
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1.00	pkt	50,000,000	99.89	50,000,000	1.00	pkt	40,899,900	35.45	14,495,000			35.4

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AP PEF VI
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1.00	pkt	109,991,000	90.55	109,991,000	1.00	pkt	89,261,200	25.45	21,200,000			25.4
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	pkt	90,078,400	90.91	90,078,400	1.00	pkt	71,234,700	87.76	68,270,000			87.7
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda	50.00	dok	74,964,000	95.67	74,964,000	50.00	dok	81,924,000	25.00	20,481,000			25.0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AP SES VA
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
			ng Undangan yang Diundang kan													
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	lap	199,854,200	99.92	199,746,278	12.00	lap	127,931,250	14.29	18,121,250			14.2
							0.00									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AI PE Y
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10.00	lap	551,488,100	99.66	930,234,600	10.00	lap	479,268,700	-	-	-	-	-
		Pengadaan Meibel	Jumlah Paket Mobel yang Disediakan	150.00	unit	235,000,000	100.00	234,300,000	150.00	unit	96,277,500	-	-	-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	35.00	unit	445,638,100	100.00	445,159,600	35.00	unit	82,140,800	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE... AP... (PER TA...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
			Diusulkan													
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1020	unit	250,950,000	180.47	250,775,000	10.00	unit	300,810,000					
							0.00	-								-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerin	24.00	lap	1,601,295,000	100.00	1,590,611,767	4.00	lap	1,579,197,000	14.33	226,126,085			14.33

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AI PE Y
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			tahan daerah													
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	lap	108,785,000	100.00	158,012,067	12.00	lap	171,880,000	17.44	30,926,000	-		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.00	lap	1,443,450,000	100.00	1,481,598,800	12.00	lap	1,495,617,050	13.33	196,000,000			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE... AN PER YA
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
			yang diperoleh													
							0.00									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	60.00	lap	1,025,287,529	99.74	1,021,169,500	11.00	lap	1,153,799,469	4.13	52,300,000	-	-	4.13

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE... AP... PER... YA...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35.00	unit	525,207,519	100.13	823,200,000	35.00	unit	401,999,665	17.23	52,920,000			17.2
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15.00	unit	210,000,000	100.00	219,825,000	15.00	unit	200,000,000					100

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE Al yg Y
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50.00	unit	50,000,000	100.00	49,999,500	50.00	unit	100,200,000	-				100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15.00	unit	490,000,000	100.00	428,099,000	15.00	unit	550,000,000	-				100

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AP PER TA
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				0.00	-								-
							0.00	-								
	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk irigasi						0.00	-								-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dilaksanakan (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AP PEF Yu
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas lahan yang teraliri (ha)	21454.31	ha	21,885,600,000	100.00	21,413,258,400	21,414.31	ha	6,243,629,500	4.00	249,980,100	-	-	4.00
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Total Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik	18.74	km	21,885,600,000	99.61	21,413,258,400	1024.83 km	km	6,243,629,500	4.00	249,980,100			4.00

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AN PER Tri
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	2.34	km	3,599,580,000	100,33	3,364,674,400	4.70	km	1,999,784,000	0.30	6,027,500			0.30
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	11.20	km	16,796,100,000	99.62	16,514,648,500	16.43	km	3,002,687,200	0.37	11,158,600			0.37
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.20	km	709,000,000	99.54	672,167,350	2.00	km	596,943,800	38.30	228,620,000			38.3

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		PE... AN PER YA
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Rekonstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Rekonstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	9.00	dok	860,000,000	99.86	842,372,150	2.00	dok	394,214,520	0.70	4,160,000.00			0.70
							0.00	-								
				73.60	persen	11,339,428,035	0.00	-	73.60	Perse n	11,048,121,350					-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AP PE YU
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase/kumulatif jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	82.22	persen	15,595,428,083	100.64	14,831,790,655	247,888.00	BT	11,042,121,300	0.13	18,601,606			0.13

No	Jasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang direvisi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AP PE VI
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan	100.00	Ls	15,595,428,000	100.00	14,831,790,655	1,600.00	Sk	11,042,121,300	0.15	16,401,600			0.15
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM yang disusun	2.00	dok	200,000,000	100.00	197,838,100	2.00	dok	195,100,000	0.68	1,360,900			0.68

No	Uraian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AP PER YI
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pantaisan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum SPAM/ Jaringan Perpipaan yang dibangun	13.00	liter/detik	15,395,429,035	100.07	14,633,952,555	7.00	liter/detik	10,843,021,300	0.14	15,240,700			0.14
							0.00	-								
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	96.12	persen	10,449,771,700	100.00	10,393,389,300	96.36	persen	5,625,259,000	-	-			-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang direvisi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		KE-AN (PER-YA
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah rumah tangga yang terlayani	97.00	RT	10,449,371,700	100.31	10,393,389,300	6,486.00	RT	9,621,259,000	-	-			-
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Sesangat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	97.00	RT	10,449,371,700	100.31	10,393,389,300	400.00	RT	1,625,259,000	-	-			-
							0.00	-								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dioptimasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE - AP PEN VU
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	37.58	person	1,135,000,000	100.00	1,085,425,800	78.35	person	1,919,591,000	8.86	116,904,800			8.86
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah	410.00	unit	1,135,000,000	100.00	1,085,425,800	160.00	unit	1,919,591,000	8.86	116,904,800			8.86

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Pragram (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AI PER VI
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	dokumen sederhana yang telah fungsi													
		Pengalokasian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dibuatkan sasikan	3.03	Bangunan gedung	585,000,000	99.02	577,934,700	1.00	bangunan gedung	749,400,000	1.01	8,017,000			1.01

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		BE... AP... PER... YA...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran - Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Pendal Teknis TPT,	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan	1.00	dok	502,000,000	98.86	907,490,600	1.00	dok	520,191,000	20.02	108,627,800			20.0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		Ri A (R Y
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perilik, dan Pendirian Bangunan Gedung melalui SIMBG	n Gedung PTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Perilik, dan Pendata an Bangun n Gedung melalui SIMBG													

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)			KE... AP... PEN... YA
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang terbangun		unit		0.16	554,200		unit	-	-	-	-	-		
							0.00	-									
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah komulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	69.00	unit	11,009,572,010	100.00	10,883,666,949	63.00	bangunan	13,116,249,300	0.76	101,790,840			0.70	

No	Tasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE... AP... PER... YA...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	4.00	unit	11,609,577,010	100.00	10,833,966,943	6.00	unit	13,316,248,330	0.3%	101,290,640			0.7%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE Ai PD Y.
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	21.00	Kawasan	10,339,577,010	100.00	16,272,648,243	8.00	Kawasan	13,216,249,300	0.76	101,290,640			0.76

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE... Ai... PD... Y...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Ditetapkan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1,00	dok	670,000,000	99,72	661,186,700	-	0	-	-	-			-
							0,00	-								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		KE AP (PER VI
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	62.11	persen	69,041,397,705	100.00	55,842,407,428	64.07	persen	35,098,522,757	0.23	79,974,100	-	-	17.7
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	481.12	km	69,041,397,705	100.00	55,842,407,428	496.12	km	35,098,522,757	0.23	79,974,100			0.23

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		KE AP PEN YU
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	k
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perancangan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6.00	dok	1,388,414,500	100.00	1,297,314,890	2.00	dok	703,000,000	3.99	23,873,100			3.99

No	Uraian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)			RE... AI dari Ti...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	1.00	Jembatan	8,649,747,000	100.00	8,433,844,914	-	Jembatan	-	-				-	
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan kabupaten yang direkonstruksi	1.23	Km	10,430,336,205	100.00	9,513,004,859	2.30	km	10,547,750,300	0.11	11,722,000			0.11	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2.61	Km	9,235,080,000	100.00	8,912,859,208	1.35	km	4,178,216,790	0.30	12,612,000.00			0.30	
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1.00	Jembatan	1,125,000,000	100.00	983,876,023	1.00	Jembatan	200,000,000	-	-			-	

No	Asaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AI PER Y
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	470.00	km	470,000,000	120.00	655,736,961	318.19	km	434,013,500	2.55	10,004,600			2.55
		Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi	21.19	km	23,012,220,000	100.00	22,519,039,374	3.16	km	10,818,255,996	0.31	11,416,900			0.11
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kabupaten yang dipelihara secara rutin	10.00	km	8,000,000,000	100.00	7,526,831,159	7.00	km	8,196,677,861	0.12	10,205,100.00			0.12
							0.00	-								-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Pruguam (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE - AI PEI Y.
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	72.77	persen	625,000,000	100.00	932,577,850	81.34	persen	585,792,300	27.90	203,224,400			27.9
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang diberikan dengan sertifikat pelatiha	111.00	org	400,000,000	100.00	569,117,850	176.00	org	523,665,000	53.00	171,640,000			53.0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)			RE... Al... PD... Ta...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	
			n operator dan teknis analis														
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih atau Anaka	111.00	org	470,000,000	100.00	389,317,850	700.00	org	796,525,000	14.31	162,282,500				14.3

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE - AI PD Y
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
			yang Mengiku ti Pelatiha n													
		Pemberdaya dan Peningkata n Kapasitas Kelembagaa n Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruk si yang Dibina dan Ditingkat kan Kapasita nya						17.00	Jumlah Lembaga	24.142.000	35,29	8.856.500		
							0.00									

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi	5.00	dok	75,000,000	100.00	64,500,000	10.00	DOK	131,445,300	9.03	11,865,900			9.03
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1.00	dok	75,000,000	100.00	64,500,000	2.00	DOK	30,445,300	17.76	6,637,400			17.7

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		Re , Ai PD Y.
				K		Rp	X	Rp	X		Rp	K	Rp	K	Rp	X
		Penyediaan Perangkat Penelolaan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan						1.00	Perangkat Pendukung	92,000,000	5.62	5,238,500			
							0.00	-								
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kesalahan konstruk	97.00	proyek	160,000,000	100.00	138,760,000	97.00	proyek	90,672,000	21.64	19,618,100	-	-	21.6

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE... A... PD... Y...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
			a)													
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	30.00	Badan usaha	150,000,000	100.00	138,780,000	37.00	Badan usaha	90,672,000	21.64	19,678,500			21.6
							0.00									

KEPALA DINAS PERTANIAN UMUM
DAN TATA RUANG Kab.

No	Jasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE... AP... PER... YA...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan RTR	50.00	persen	700,000,000	100.00	652,920,977	57.69	persen	1,172,332,600	1.15	13,895,500			1.15
			Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	100.00	persen	100,000,000	100.00	90,873,200	77.38	persen	122,879,700	17.05	20,930,200			17.0
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Dan Rencana Rinci Tata Ruang RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah rancangan peraturan kepala daerah RDTR	4.00	dok	150,000,000	100.00	148,447,100	7.00	dok	503,899,900	1.66	8,348,000	-	-	1.66

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		KE - AI PDF Y
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada tatah RTRW Kabupaten/Kota	2.00	dok	350,000,000	100.00	148,447,100	3.00	dok	103,890,900	1.44	8,348,000			1.44
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/kota	1.00	dok	550,000,000	100.00	504,373,877	2.00	dok	668,432,700	1.13	7,137,500			1.13

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE Al (KE Y.
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	4.00	dok	550,000,000	100.00	504,373,877	7.00	dok	668,432,700	1.13	- 7,127,500			1.13
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi	44.00	- dok	109,000,000	0.00 100.00	- 90,873,200	30.00	dok	122,879,700	17.03	20,930,200			- 17.0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE... Al... pad... Ta...
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
			dan pembangunan daerah													
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	24.00	dok	50,000,000	100.00	43,791,200	15.00	dok	60,582,900	28.57	10,028,000			16.5
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfa	20.00	dok	50,000,000	100.00	47,082,000	20.00	dok	62,376,850	17.48	10,902,200			17.4

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun Lalu			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			TRIWULAN I (%)		TRIWULAN II (%)		RE AP PEN YU
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
			alan nsang													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												8.45		-		16.1
Predikat Kinerja																

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam XXPD berikutnya *):

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.2.1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan.

2.2.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas PUTR memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

2.2.3. Struktur Organisasi Dinas PUTR

Struktur Organisasi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
    a. Sub bagian Umum;
    b. Sub bagian Keuangan; dan

3. Bidang Bina Marga, membawahkan;
    a. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan;
4. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan;
    a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan
5. Bidang Tata Ruang, membawahkan;
    a. Jabatan Fungsional Teknik Penata Ruang
6. Bidang Cipta Karya
    a. Jabatan Fungsional Teknik Bangunan dan Perumahan;
7. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan;
    a. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
8. UPTD Peralatan & Perbengkelan;
9. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
10. UPTD DPUTR Wilayah;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang yaitu membantu Bupati Sumedang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan bahwasannya keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Kabupaten Sumedang sangat berperan penting dalam hal pemenuhan pelayanan dasar publik di antaranya seperti pemenuhan pelayanan di bidang infrastruktur meliputi Program Penyelenggaraan Jalan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan dan jembatan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air untuk melaksanakan pembangunan jaringan irigasi yang mana kedua program kegiatan tersebut merupakan program unggulan yang harus ada setiap tahun. Selain program tersebut ada program untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta program pendukung lainnya diantaranya program

Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Kontruksi dan Program Penyelenggaraan Tata Ruang.

2.2.4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

Berdasarkan pembahasan mengenai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan umum yang telah diberikan oleh aparatur Pemerintah sudah berjalan dengan baik, dimana diperoleh hasil penelitian dengan menggunakan 9 indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Nilai Komulatif Survei Kepuasan Masyarakat pada periode Januari-Desember 2024 sebesar 87,07 oleh karena itu kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tersebut dapat dikategonikan Baik sampai dengan Triwulan 4.

Pengolahan data SKM diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.3 Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
KM per unsur	3.525	3.375	3.300	3.475	3.350	3.625	3.600	3.325	3.800
Kategori	B	B	B	B	B	A	A	B	A
KM Unit Layanan	87.07 (B. Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

A. **Persyaratan**

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor 88,13 berada pada interval skor 76,61 – 88,30. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan ruang lingkup persyaratan berada pada kategori Baik

B. **Prosedur**

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 84,38 berada pada interval 76,61 88,30. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan ruang lingkup prosedur berada pada katagori Baik.

C. **Waktu Pelayanan**

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 82,50 berada pada interval skor 76,61– 88,30. Dengan demikian kepuasan masyarakat

kategori Baik.

D. **Biaya/ Tarif**

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 86,88 berada pada interval 76,61 88,30 . Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori Baik.

E. **Produk layanan**

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 83,75 berada pada interval 76,61 88,30. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori Baik.

F. **Kompetensi Pelaksana**

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 90,63 Berada pada interval 88,31 – 100,00. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori Baik.

G. **Perilaku Pelaksana**

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 90,00 berada pada interval skor 88,31– 100,00. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori Baik.

H. **Sarana dan Prasarana**

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 83,13. Berada pada interval skor 76,61– 88,30. Dengan demikian kepuasan

berada pada kategori Baik.

l. **Penanganan Pengaduan**

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 95,00 Berada pada interval skor 88,31– 100,00. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil data tersebut, informasi penting yang dapat disampaikan antara lain :

1. Dapat diketahui bahwa unsur pelayanan Waktu Pelayanan mendapat nilai terendah (82,50), sedangkan Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi (95,00)
2. Dapat diketahui bahwa produk layanan mendapatkan nilai terendah disebabkan karena produk layanan kurang lengkap dan kurang memadai, sehingga akan menjadi masukan yang sangat berharga untuk diperbaiki dan ditingkatkan.

Tabel 2.4

Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Pendapatan	Waktu	Penanggung Jawab
1	Persyaratan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Januari – Desember 2025	Kadis, Kasubag Umpegset
2	Prosedur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Januari – Desember 2025	Kadis, Kasubag Umpegset
3	Waktu Pelayanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Januari – Desember 2025	Kadis, Kasubag Umpegset

		Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Desember 2025	Perencana Ahli Muda Bagian Program
5	Produk layanan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Januari – Desember 2025	Kadis, Ka. UPTD Peralatan & Perbengkelan, Ka. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
6	Kompetensi Pelaksana	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Januari – Desember 2025	Kadis, Kasubag Umpegset
7	Perilaku Pelaksana	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Januari – Desember 2025	Kadis, Kasubag Umpegset
8	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Januari – Desember 2025	Kadis, Kasubag Umpegset
9	Penanganan Pengaduan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Januari – Desember 2025	Kadis, Kasubag Umpegset

Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yaitu unsur yang perlu dipertahankan dan unsur yang perlu diperbaiki. Unsur yang perlu dipertahankan dalam tingkat kepuasan masyarakat diantaranya adalah : Penanganan pengaduan, Tingkah laku petugas layanan, Keterampilan petugas, dan prosedur pelayanan yang jelas. Unsur tersebut merupakan aspek penting di dalam pencapaian tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Unsur-unsur tersebut harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kembali untuk mencapai tujuan dari diselenggarakannya pelayanan publik.

pelayanan yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Peranan sarana pelayanan merupakan hal penting disamping peran unsur sumber daya manusianya sendiri. Masih ditemukannya beberapa fasilitas yang masih tergolong terbatas dan belum memadai seperti ruangan 15 pelayanan yang masih terasa sempit untuk menampung pengguna layanan atau masyarakat. Namun demikian Dinas PUTR terus memperbaiki sarana-dan prasarana yang yang dimulai dengan pembangunan ruang pelayanan terpadu di Dinas PUTR, Pembangunan ruang menyusui, perpustakaan, ruang pengamanan, dan kantin. Kemudian unsur lain yang perlu diperbaiki adalah penyerapan retribusi pendapatan asal daerah dari segi pelayanan. Unsur di atas dapat menghambat terlaksananya pelayanan publik dan dapat menghambat pencapaian tujuan pelaksanaan pelayanan publik. Instansi terkait akan terus mencari solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga dapat tercapainya pelayanan publik yang berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pembahasan mengenai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan umum yang telah diberikan oleh aparatur Pemerintah sudah berjalan dengan baik, dimana diperoleh hasil penelitian dengan menggunakan 9 indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Nilai Komulatif Survei Kepuasan Masyarakat pada periode Januari-Desember 2024 sebesar 87,07 oleh karena itu kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tersebut dapat dikategorikan baik.

2.2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024

INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TAHUN 2024		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
			TARGET (%)	REALISASI (%)	TAHUN 2025 (%)	TAHUN 2026 (%)	
Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota			91,52	97,54			Untuk proyeksi pada Tahun 2025 & Tahun 2026 masih mengacu kepada Renstra Dinas PUTR yang baru - periode 2025 s.d 2026, sehingga belum dapat ditentukan karena indikator yang
Persentase luas daerah rigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan rigasi			71,35	71,4			
Kesesuaian terhadap RTR			72,25	75,46			
Persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan			33,34	33,33			
Persentase cakupan pelayanan aksara sentasi layak			96,12	97,06			
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota .			82,1	82,34			

lingkungannya yang bersih							
Nilai sakip perangkat daerah	Kategori		- A	A			
Zona integritas (ZI) perangkat daerah	Nilai		64	70,57			

Ada pun Analisa atau faktor-faktor penyebab capaian target kinerja diantaranya yaitu:

1. Pada indikator kinerja "***Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota*** sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 87,54% dari target 91,50% atau dengan Tingkat capaian 95,67 %. Hal ini disebabkan adanya penanganan rekonstruksi Jalan sepanjang 8,072 km, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 8,773 km, rehabilitasi jalan sepanjang 22,649 km dan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 12,348 km sehingga dapat menambah Panjang jalan kondisi mantap sepanjang 710,206 km sehingga capaian Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota tahun 2024 sebesar 87,54 %. Namun capaian terhadap target adalah 95,67% dikarenakan bertambahnya Panjang jalan kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 375 Tahun 2024 panjang ruas jalan kabupaten meningkat semula 774,368 km menjadi 811,318 km. Sehingga survey kondisi Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota pada tahun 2024 mendapatkan nilai kemantapan jalan 87,54% (dalam kondisi baik dan sedang).
2. Pada indikator kinerja " **Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**" tahun 2024 adalah sebesar 71,4% dari target 71,35% atau 100,07%. Hal dikarenakan adanya kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan seluas 58,68 Ha, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan seluas 360,17 Ha dan operasi pemeliharaan jaringan

daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 21468,80 Ha sehingga capaian persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2024 adalah sebesar 71,4%.

3. Pada indikator kinerja " **Ketaatan terhadap RTR** " Tahun 2024 adalah sebesar 75,46% dari target 72,24% atau 104,46 % dengan data capaian polar uang tahun 2024 sebesar 41,09% dan capaian struktur ruang tahun 2024 sebesar 34,38%. Untuk tahun 2024, IKU Bidang Tata Ruang melampaui target yang telah ditentukan hal ini dikarenakan adanya peningkatan persentase angka pada realisasi polar uang terhadap kondisi eksisting RTRW yang merupakan salah satu kriteria dalam perhitungan IKU Bidang Tata Ruang.
   Kenaikan capaian indeks kinerja utama Bidang Tata Ruang disebabkan oleh factor peningkatan investasi yang memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya. Dimana penambahan pemanfaatan ruang pada Kawasan budidaya menjadi kontribusi terbesar terhadap peningkatan IKU. Namun pada Tahun 2024 tidak terdapat peningkatan pada capaian persentase struktur ruang. Kriteria persentase angka polar uang didapat dari luasan lahan dari pelayanan permohonan Masyarakat untuk pengesahan siteplan yang telah masuk yang sesuai dengan peruntukan ruang dalam RTRW dan dibutuhkan menjadi salah satu persyaratan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
4. Pada indikator kinerja "**Persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan** " untuk Tahun 2024 sebesar 33,33% dari target 33,34% atau dengan Tingkat capaian 100%. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi sebanyak 50 penyedia sehingga dapat menambah jumlah komulatif penyedia jasa kontruksi yang mendapatkan pembinaan tahun 2024 sebesar 33,33%.

sanitasi layak " untuk Tahun 2024 adalah sebesar 87,08% dari target 96,12% atau dengan Tingkat capaian 90,59%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat sebanyak 750 rumah tangga sehingga dapat menambah jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses cakupan pelayanan akses sanitasi layak sebanyak 201.230 rumah tangga dan mencapai persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak tahun 2024 sebesar 87,08%. Namun target tidak tercapai karena anggaran yang tidak mencukupi.

6. Capaian Indikator Kinerja Utama "**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota** " pada tahun 2024 adalah sebesar 82,34% dari target 82,10% atau dengan Tingkat capaian 100,29%. Dengan adanya sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sebanyak 1411 rumah tangga sehingga dapat menambah jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum tangga di seluruh kabupaten/kota, dan mencapai persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tahun 2024 sebesar 82,34%.
7. Pada capaian indikator Kinerja Utama " **Persentase bangunan pemerintah dan lingkungannya yang tertata** " Tahun 2024 adalah sebesar 75% dari target 73,75% atau dengan Tingkat capaian 101,69%. Hal ini dapat dijelaskan karena adanya sub Kegiatan Penataan Nangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainya sebanyak 60 kawasan sehingga

lingkungannya yang tertata sebanyak 7 kawasan dan mencapai persentase bangunan pemerintah dan lingkungannya yang tertata pada tahun 2024 sebesar 75%.

Implikasi yang akan timbul jika indikator kinerja program dan kegiatan dapat terpenuhi atau tercapai maka sasaran terhadap target capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dapat tercapai juga dan dikatakan program dan kegiatan tersebut menembak sasaran program Renstra dinas maupun RPJMD pada umumnya. Namun sebaliknya apabila indikator kinerja program dan kegiatan tidak tercapai maka akan mempengaruhi capaian Renstra dan dapat mempengaruhi hasil raport perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan hasil yang tidak baik sehingga menggambarkan bahwa kinerja dari perangkat daerah tidak optimal.

Kebijakan dan tindakan yang harus diambil dalam perencanaan serta penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut diantaranya yaitu :

1. Perlunya perencanaan yang matang dan konsisten pada saat pelaksanaan pembangunan.
2. Pelaksanaan pembangunan harus mengacu kepada dokumen perencanaan yang sudah ditentukan.
3. Penganggaran yang sesuai atau bisa disebut " Money Follow Function dapat dijelaskan bahwa penganggaran harus mengikuti kebutuhan pembangunan sehingga pelaksanaan pembanguhan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga target akan tercapai.

a. **Gambaran Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun lalu sampai dengan capaian semester I tahun berjalan terhadap target IKU yang telah ditentukan tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengalami peningkatan dan cenderung tercapai untuk beberapa indikator. Sehingga perlu diambil kebijakan dalam perencanaan untuk tahun depan dalam penanganan infrastuktur baik jalan maupun irigasi agar lebih efektif dan bermanfaat dengan kata lain kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala harus lebih diprioritaskan anggarannya untuk mempertahankan kondisi tetap mantap untuk infrastruktur jalan.

Sementara itu ada beberapa hal yang dianggap kritis yaitu permasalahan terkait dengan isu lingkungan yang relevan dengan perangkat daerah secara global dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perubahan iklim dapat mengganggu pola curah hujan dan ketersediaan air untuk irigasi.
2. Irigasi yang tidak efisien dapat memperburuk kelangkaan air, terutama di wilayah dengan curah hujan yang tidak teratur atau perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan
3. Ketersediaan air yang aman dan cukup bagi seluruh penduduk dunia, yang semakin terancam oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, peningkatan populasi, pencemaran, dan pengelolaan air yang tidak berkelanjutan. Krisis air ini tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga pada pertanian, industri, dan bahkan dapat memicu konflik sosial.
4. Polusi sumber air, kerusakan ekosistem, ancaman kesehatan manusia, dan dampak negatif terhadap ekonomi. Air limbah yang tidak terolah dengan baik dapat mengandung berbagai polutan seperti bakteri, virus, bahan kimia, dan mikroplastik, yang menyebabkan pencemaran air, kesehatan, dan lingkungan.
5. Perubahan iklim dan kebutuhan akan bangunan yang lebih ramah lingkungan mendorong pengembangan bangunan hijau (green building) dan teknologi seperti BIM (Building Information Modeling) untuk meningkatkan efisiensi energi dan manajemen fasilitas.
6. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana alam (banjir, longsor, kekeringan) yang dapat mengancam infrastruktur dan masyarakat miskin.

8. Dari global menuju ekonomi hijau dan digitalisasi, hal ini memerlukan infrastruktur jalan yang mendukung logistik hijau dan konektivitas pariwisata.
9. Meningkatnya persaingan usaha antar negara, keterbukaan pertukaran tenaga kerja konstruksi antar negara, pembangunan infrastruktur dunia yang mengedepankan penerapan kecanggihan teknologi.
10. Penerapan teknologi Era 4.0 seperti adopsi teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), yang diaksanakan dalam pelayanan public.

Selain permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, terdapat permasalahan perangkat daerah yang lainnya seperti di bawah ini :

1. Banyaknya Jaringan Irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air yang optimal.
2. Terbatasnya masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih atau sistem penyediaan air minum yang layak.
3. Bangunan gedung yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
4. Tingginya kerusakan infrastruktur jalan akibat bencana longsor/mobilitas alat berat terbatas.
5. Keterbatasan anggaran dan masih terdapat ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak/kurang mantap dan akses konektivitas antar wilayah belum optimal.
6. Akses jalan menuju destinasi wisata lokal masih terbatas dan belum berstandar.
7. Penyelenggaraan Program, kegiatan,subkegiatan sesuai dengan Kewenangan pemerintah daerah pada urusan jasa konstruksi belum optimal.
8. Dinamika regulasi pemerintah pusat dan provinsi
9. Pelayanan Pemanfaatan Ruang Belum Optimal

Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu;

1). Ketersediaan anggaran dari APBD Kabupaten Sumedang tidak memadai;
2). Kurangnya koordinasi antar dinas terkait dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan;

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang, yaitu antara lain :

a. Kurangnya jumlah ASN yang kompeten di bidang perencanaan;
b. Adanya pergeseran anggaran setelah ditetapkan APBD;
c. Permohonan pengajuan SPP SPM TPP terlambat;
d. Pemenuhan kelengkapan dokumen SPJ khusus perjalanan dinas;
e. Pengajuan belanja langsung (LS) pihak III terlambat;
f. Ketidaksesuaian serta ketidakakuratan dokumen database dengan kebutuhan di Bidang Sumber Daya Air;
g. Ketidaksesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
h. Pemilik lahan/sawah tidak memberikan izin untuk perbaikan saluran;
i. Keterbatasan anggaran untuk infrastruktur jalan sehingga beberapa ruas jalan yang kemantapan jalannya tidak 100% tuntas.
j. Kualitas dan kuantitas dari konstruksi saluran irigasi yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga berpengaruh terhadap masa umur layanan kontruksi.
k. Tidak sesuai antara volume kontrak dengan volume dilapangan.
l. Tidak ada sumber daya manusia untuk petugas operasi dan pemeliharaan seperti penjaga bendung, penjaga pintu air dan penjaga saluran untuk mengontrol jaringan irigasi.
m. Tidak ada anggota unit siaga banjir yang melaksanakan survey karena tidak ada anggaran untuk biaya survey dan upah anggota sehingga Lokasi yang terkena dampak bencana tidak mendapatkan penanganan.
n. Kurangnya sumber daya manusia untuk proses perencanaan yang dapat menginput usulan yang di dalamnya harus ada gambar rencana dan RAB.
o. Masih kurangnya fasilitas ssarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan berupa rekomendasi persetujuan bangunan Gedung.
p. Banyaknya calon peserta pelatihan tenaga kerja konstruksi yang mendaftar di akhir tengat waktu.
q. Tidak semua penyedia jasa yang terdaftar/ terintegrasi dan aktif di Aplikasi SIMJAKON.
r. Keterbatasan pemahaman pelaku usaha dalam mengakses aplikasi OSS RBA untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

c. Tantangan dan Peluang Dinas PUTR

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas PUTR menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas PUTR dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang antara lain adalah :

a). Tantangan

1. ***Masih kurangnya kualitas pembangunan dari penyedia jasa lokal.***
   Kemampuan penyedia jasa konstruksi lokal yang masih kurang dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap peraturan jasa konstruksi sehingga kualitas pelaksanaannya pun masih kurang. Hal ini menjadi tantangan yang harus diminimalkan karena sangat berdampak signifikan terhadap kualitas infrastruktur yang dibangun.
2. ***Kondisi geografis yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur.*** Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang kondisi alamnya antara lain berupa dataran rendah hingga dataran tinggi dengan banyak sungai, gunung, dan pengaruh curah hujan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaksanaan pelayanaan ke-Puan. Lebih lanjut kondisi geografis tersebut juga berdampak pada kerentanan wilayah terhadap bencana, yang perlu diantisipasi dengan upaya pengurangan resiko bencana.

b). Peluang

1. ***Adanya peraturan perundangan (UU-PP-Perpres-Permen-Perda-Perbup) yang mendukung kinerja organisasi***
   Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas PUTR tidak terlepas dari dukungan peraturan perundangan yang ada, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan teknis yang dikeluarkan Kementerian baik secara vertical maupun horizontal. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan tersebut sangat membantu dalam merumuskan kebijakan maupun penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas Dinas PUTR terlebih berkaitan dengan penentuan kebijakan satuan harga yang sangat

menjadi adanya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi lebih aman dan tepat serta kehati-hatian dalam merancang kebijakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Hal ini menjadi faktor yang mendukung pencapaian tujuan organisasi Dinas PUTR.

2. ***Adanya koordinasi yang baik antar instansi vertikal.***

   Terbukanya akses koordinasi secara vertical dan horizontal baik antar pusat dan daerah maupun antar pemda dan perangkat daerah menjadikan peluang bagi peran Dinas PUTR dalam meningkatkan kualitas perencanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Koordinasi tersebut dapat meningkatkan sinerginitas maupun integrasi antara perencanaan pusat dan daerah serta antara perencanaan daerah dengan perangkat daerahnya sehingga dalam pembagian kewenangan dibidang pekerjaan umum khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan maupun irigasi akan lebih sinkron dan terintegrasi disetiap pembangian kewenangan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu diharapkan koordinasi vertical dan horizontal dapat mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3. ***Adanya potensi pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektifitas kinerja urusan PUTR.***

   Peran teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan PUTR sudah menjadi hal yang mutlak. Adanya kebutuhan alat alat penunjang dengan teknologi tinggi terutama pada pelayanan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan perekayasaan perlu secara gradual dipenuhi dalam mewujudkan pelayanan PUTR yang paripurna.

Untuk formulasi isu-isu penting Langkah yang harus ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang harus melakukan koordinasi dan sinergi program kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan melakukan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi melalui kegiatan Musrenbang Provinsi serta dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Kegiatan Konferensi Regional dalam rangka target pelaksanaan pembangunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas PUTR berdasarkan RKPD.

RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Renstra 2025-2030 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Dinas PUTR Kabupaten Sumedang tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas PUTR Tahun 2025 - 2030 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumedang yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR Kabupaten Sumedang.

Rancangan awal RKPD dapat berubah setelah dilakukan kembali analisa kebutuhan. Setelah melalui proses verifikasi, adanya kegiatan Musrenbang meliputi usulan PIK, PI SKPD, Pokir dan sebagainya terdapat banyak perbedaan antara rumusan program, kegiatan dan rincian sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD termasuk perubahan besaran pagu dan volume pada program, kegiatan dan sub kegiatan dikarenakan usulan dari beberapa para pemangku kepentingan belum terakomodir di rancangan awal RKPD.

Renja Perubahan – rumusan baik program, kegiatan dan sub kegiatan banyak yang berubah setelah melalui proses tahapan yang dimulai dari adanya kegiatan Forum PD, verifikasi usulan Pokir, verifikasi usulan PI SKPD, hibah dan sebagainya dengan maksud untuk mengakomodir kebutuhan Pembangunan yang belum masuk pada rancangan awal RKPD atau Renja Dinas PUTR Tahun 2026. Sehingga dari hasil proses tersebut terdapat perbedaan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan rancangan awal sebelumnya.

2.5 Telaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat (Usulan PIK, PI PD, Hibah dan Bansos)

Rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Dinas PUTR Kabupaten Sumedang terdapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari usulan aspirasi masyarakat dan rumusan program kegiatan yang berasal dari PI PD itu sendiri. Ada pun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan itu diperoleh berasal dari usulan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kecamatan, forum PD dan musrenbang tingkat kabupaten.

Kegiatan Musrenbang tersebut dilaksanakan melalui forum perangkat daerah dan dihadiri dari bebrapa stakeholder yang berkepentingan yang memiliki kebijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Setelah melalui tahapan proses musyawarah rencana pembangunan daerah tersebut kemudian rumusan program dan kegiatan di entry ke dalam sistem informasi perangkat daerah atau lebih dikenal dengan *SIPD*.

BAB III

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 telah mempedomani kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi dan terintegrasi sehingga perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di daerah. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat salah satunya perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di daerah yaitu dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemabngunan dan Keuangan Daerah.

Hal ini berdampak dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dalam rencana pembangunan tahunan dimaksud harus diwujudkan oleh RKPD/Renja yang merupakan penjabaran dari Renstra PD dan disusun melalui pendekatan teknoratik, politik dan partisipatif yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah atau Perangkat Daerah dan Program strategis Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi memiliki kewajiban untuk

pembangunan pemerintah daerah pada Tahun 2026.

Pada Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Renja) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 bahwa Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2026 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Kesesuaian Prioritas Pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut dengan dirumuskannya keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2026. Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2026 dengan sasaran PN RKP Tahun 2026. Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan PN RKP Tahun 2026 serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2026.

Rumusan prioritas pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 tersebut telah memperhatikan program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029 serta didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 hasil evaluasi kinerja Renja Tahun 2025.

Sebagaimana Provinsi Jawa Barat memiliki Visi Jabar "***Istimewa***" yang memiliki tagline "***Lembur Diurus Kota Ditata***" Tahun 2025 – 2029 yaitu situasi atau kondisi Dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/berkomitmen untuk mengistimewakan Masyarakat, baik Istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun Istimewa dalam pelaksanaan Pembangunan. ***Istimewa*** adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan

Perlindungan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastruktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa dan bidang – bidang lainnya berada dalam kondisi Istimewa.

Sebagai pelaksana fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain bersinergi dengan Pemerintah Pusat juga mempunyai kewajiban untuk mensinergikan perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2026.

Pada dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Renja) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 bahwa Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Visi Misi Provinsi Jawa Barat "Istimewa" Tahun 2025 – 2029 maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang berkewajiban melaksanakan Misi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam membangun infrastruktur jalan, Pembangunan sanitasi, SPAM dan jaringan irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PUTR KABUPATEN SUMEDANG

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 bertujuan untuk :

1. Menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dalam program dan kegiatan Tahun 2026;

Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan secara terukur dan terarah;

3. Menjadikan tolak ukur kinerja bagi aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dalam implementasi program dan kegiatan Tahun 2026.

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 yaitu :

1. Meningkatnya kinerja perencanaan aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan indikator kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2026;
2. Tercapainya tujuan Pembangunan Daerah di Wilayah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian nomenklatur Program dan kegiatan telah mengalami perubahan yang diatur dalam ***Permendagri Nomor 90 tahun 2019*** yang mana selain mengalami perubahan juga terdapat penambahan sub kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;

7. Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Tata Ruang;

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem IrigasiPrimer dan Sekunder padaDaerah Irigasi yang Luasnyadi Bawah 1000 Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota;
12. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
13. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/kota;
14. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota;
15. Penyelenggraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
16. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/kota;

Jalan Nonstatus,

18. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/kota;
19. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
20. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/kota;

Faktor – Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* dimasukan ke dalam rumusan program memiliki tujuan untuk berkontribusi upaya penurunan stunting dan penurunan angka kemiskinan
2. *Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dan Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan* dimasukan ke dalam rumusan program kegiatan memiliki tujuan untuk melaksanakan program upaya meningkatkan produktifitas pertanian atau ketahanan pangan.
3. *Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penggantian Jembatan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Rehabilitasi Jalan, Rehabilitasi*

visi misi kepala daerah dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan yang tersebar di beberapa wilayah serta meningkatkan konektifitas wilayah yang masih terisolir.

4. *Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan beberapa kegiatan serta sub kegiatan di dalamnya di rumuskan untuk pencapaian NSPK.*
5. *Program Penyelenggaraan Tata Ruang, dengan beberapa kegiatan serta sub kegiatan yang telah dirumuskan kedalam lampiran renja bermaksud untuk pencapaian ketahanan daerah yang membuat Rencana Detail Tata Ruang.*

Dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 baik program unggulan yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari Bantuan Provinsi (Banprov) ataupun dari Kabupaten Sumedang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengambil kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur menuju kawasan objek pariwisata, perkebunan, pertanian serta industri.

Sumedang Tahun 2026 dengan merencanakan 8 program, 21 kegiatan dan 93 sub kegiatan dengan jumlah anggaran belanja SKPD adalah sebesar Rp. **272.681.892.844,00** dengan rincian sumber anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang diharapkan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan dapat terealisasi sepenuhnya guna mendukung pencapaian program-program yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam lampiran tabel 3.1.

FORM III.1

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Hasil/ Output						Pagu Indikatif Hasil	Kondisi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program Kegiatan
						Tolok Ukur Hasil	Target	Indikator	Target	Indikator	Target				Tolok Ukur
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

URAIAN						KEADAAN AWAL											
						KEADAAN YANG DIUBAH		KEADAAN SAAT MENGUSULKAN		KEADAAN YANG DIUSULKAN		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Unit/Lokasi Penting Administrasi Pegawai	PERUBAHAN KE-(1)		
															TANGGAL DITETAPKAN (2)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KODE					Uraian/Sub Uraian Kegiatan/Jenis Belanja	INDIKATOR KINERJA								PROGRAM/KEGIATAN
						CAPAIAN PROGRAM		HASIL KEGIATAN/KELUARAN		OUTPUT KEGIATAN		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Data	Cara Pengukuran Kinerja dan Keterangan	CAPAIAN KEGIATAN
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		TOLAK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET				TOLAK UKUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Pendidikan - Gaji Pengajaran - Administrasi Perkantoran			Jumlah Tenaga Pendidik dan Pengajaran Administrasi Perkantoran	1 Kabupaten	Pendidikan dan Pengajaran Administrasi Perkantoran	1 Kabupaten				
					Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran			Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran	1 Kabupaten	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran	1 Kabupaten				
					Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Pegawai	12 dokumen	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Pegawai	12 dokumen				
					Pemasangan Reklame/ Iklan/ yang Sejenis			Jumlah Reklame Produk yang Dipasangkan	10 Unit	Pemasangan Reklame Produk yang Dipasangkan	10 Unit				
					Pemeliharaan Perlengkapan Perkantoran			Jumlah Barang yang Mengalami Kerusakan Ringan Perawatan	100 Barang	Pemeliharaan Perawatan Perlengkapan Perkantoran	100 Barang				
1	01	01	0100		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**Rp.[jml]**			
1	01	01	0100	0101	Penyediaan Komponen Instalasi Jaringan/Pengadaan Pengawas Barang			Jumlah Unit Komponen Instalasi Jaringan/Pengadaan Pengawas Barang yang Disediakan	4 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Jaringan/Pengadaan Pengawas Barang	4 Paket	Rp.[jml]			
1	01	01	0100	0102	Pengadaan/Pemasangan dan Pemeliharaan Barang			Jumlah Alat Komputer dan Pendukungnya yang Pengadaan	3 Paket	Pengadaan Pemasangan dan Pemeliharaan Barang	3 Paket	Rp.[jml]			
					Pengadaan dan pemeliharaan alat pemadam kebakaran, alat penyelamatan kebakaran, alat pengaman lainnya, perlengkapan kantor, sarana pengaman kantor										
1	01	01	0100	0103	Pengadaan/Pemasangan Peralatan Tunggal			Jumlah Paket Pemasangan Peralatan Tunggal yang Disediakan	10 paket	Pemasangan/Pemasangan Peralatan Tunggal	10 paket	Rp.[jml]			
					Pemeliharaan peralatan tunggal										
1	01	01	0100	0104	Pemeliharaan Rutin Logistik Kantor			Jumlah Paket Rutin Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Pemeliharaan Rutin Logistik Kantor	1 Paket	Rp.[jml]			
					Pemeliharaan rutin, pemeliharaan atau kalibrasi berkala, perbaikan atau penggantian komponen rusak										
1	01	01	0100	0105	Pengadaan/Pemeliharaan Perabot dan Pengelolaan			Jumlah Paket Pengadaan Perabot dan Pengelolaan yang Disediakan	4 Paket	Pengadaan Pemeliharaan Perabot dan Pengelolaan	1 Paket	Rp.[jml]			

KODE					Uraian/Sub-Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi/Kecamatan	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN DAN HASIL KEGIATAN		TARGET KEGIATAN					Unit Perangkat Daerah
						TOLAK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	Indikator/Satuan	Volume/Target				TOLAK UKUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

URAIAN						KEGIATAN/SUB KEGIATAN									
						Tolok Ukur Kinerja		Kelompok Sub Kegiatan		Indikator		Tolok Ukur Kegiatan			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Volume Unit Ukur	Capaian	Kelompok Sub Kegiatan	Target	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan	Lokasi Penting Kelompok Sub Kegiatan	Kelompok Sub Kegiatan

KODE					Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan	Catatan Penting Hasil Review Bagian	PENGESAHAN (RP)
						CAPAIAN PROGRAM		OUTCOME KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN					TARGET OUTCOME KEGIATAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET				TOLAK UKUR
					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan										
					Akun/ Kelompok/ Jenis/ Objek/ Rincian Objek/ Sub Rincian Objek										
X	XX	YY	Z.ZZ	AA	Pemerintahan Perdesaan dan Desa Adatnya			Jumlah Produksi dan Hasil Kelompoknya/Kapitanya	00 unit	Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	00 Unit				
					Etc. Internal, materi dan tambahan jumlah ini sesuai, ada dan tidak										
X	XX	YY	Z.ZZ	AA	Pemerintahan Perdesaan Kelembagaan dan Hukum Lainnya			Jumlah Desa/ Kelurahan dan Wilayah Lainnya yang Memiliki Peraturan Desa/Kelurahan	00 Unit	Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Desa/ Kelurahan dan Wilayah Lainnya	00 Unit				
					Akun/ Kelompok/ Jenis/ Objek/ Rincian Objek/ Sub Rincian Objek										
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA										
X	XX	YY			Program Pengembangan Ekonomi Desa Ini (nama)	Persentase Jumlah Usaha/ Produk/ Kelembagaan Ekonomi yang Berkembang	71,11 persen			Meningkatkan Jumlah Usaha/ Desa/ Kelompok/ Lembaga	1,00 Nomen				
X	XX	YY	Z.ZZ		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder (Jalur Saluran Irigasi yang Luasnya Mencakup 1000 ha Lebih/ 1 Jalur) (Saluran Sekunder/ Desa)			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	40,00 %	Meningkatkan Luas Irigasi Kondisi Baik di Irigasi Desa	Meter				
				XXXX	Meningkatkan Jaringan Irigasi Pemerintahan			Panjang Jaringan Irigasi yang Dikelola	0,00	Meningkatkan Jaringan Irigasi Pemerintahan	0,00				
					Meningkatkan Jaringan Irigasi Di Desa Atau Kelurahan Di Kecamatan				0,00		0,00				
					Meningkatkan Jaringan Irigasi Di Saluran Atau Di Irigasi Atau Di Desa/ Kel. Di Lokasi				0,00		0,00				
					Meningkatkan Jaringan Irigasi Di Saluran Irigasi Di Sistem Di Kecamatan Di Kel. Di Lokasi				0,00		0,00				
					Meningkatkan Jaringan Irigasi Di Saluran Irigasi Di Desa/ Kelurahan Di Kel. Di Lokasi				0,00		0,00				
					Meningkatkan Jaringan Irigasi Di Saluran Irigasi Di Jaringan Irigasi Di Kel. Di Lokasi				0,00		0,00				
					Meningkatkan Jaringan Irigasi Di Saluran Irigasi Di Jaringan Irigasi Di Kel. Di Lokasi				0,00		0,00				
					Meningkatkan Jaringan Irigasi Di Saluran Irigasi Di Jaringan Irigasi Di Kel. Di Lokasi				0,00		0,00				

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA									
						Capaian Program		Keluaran dan Jenis Kegiatan		Hasil Kegiatan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Tahun Lalu	Catatan Penting Capaian dan Manfaat	Kondisi Akhir
						Tolok Ukur	Target	Indikator	Target	Indikator	Target				Target Capaian Akhir
															Tolok Ukur
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible]					[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]							[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			
				[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]			

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif Rp.	Lokasi	Catatan Tambahan	Perkiraan Anggaran
						CAPAIAN PROGRAM		KEGIATAN/SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					Tahun ke-n
						Tolok Ukur	Target	Indikator	Target	Indikator	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Nama Instansi/Kegiatan/Sub Kegiatan/Program/Kegiatan	INDIKATOR HASIL						Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan	Catatan Penting Aktivitas Sub Kegiatan	PENGUKURAN HASIL
						Indikator Masukan		Indikator Hasil Kegiatan		Capaian Kegiatan					Target Capaian Kinerja
Sub Urusan	Program / Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Keterangan	Target	Indikator	Target	Keterangan	Target				Tahun ini
1	2	3	4	5	6	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
					[illegible]										
					[illegible]										
					[illegible]									

KODE					Uraian/Sub Uraian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan/ Indikator	KINERJA								
						CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN		HASIL KEGIATAN		Pagu Indikatif (Rp)	KONDISI CLOSE	Perubahan Penting Kebijakan dan Alasannya	TARGET CAPAIAN KINERJA
						TOLOK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET				TOLOK UKUR
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				XXXX	Terjualkan Kualitas Air/Lingkungan Pengelola Urgasi Kewenangan Pemerintah/Kota			Jumlah Lembaga Pengelola Urgasi Kewenangan Pemerintah/Kota yang Dapat Kinerjanya	4 Lembaga	Meningkatnya Pengelola Urgasi Pemerintah/Kota yang memenuhi Persyaratan Kinerjanya					
				XXXX	Terjualkan Pemerintah Pengelola Urgasi			Jumlah Lembaga Pengelola Urgasi yang Terjualkan	1 Lembaga	Meningkatnya Pengelola Urgasi yang Terjualkan Operasionalisasi					
				XXX 0	Terjualkan Kebutuhan Tahun Melang Urgasi dan Rawa			Jumlah Kebutuhan Tahun Melang Urgasi dan Rawa yang Dikelola	18 ton	Terjualkan Kebutuhan Tahun Melang Urgasi dan Rawa yang Terjualkan					
					Terjualkan Tahun Urgasi										
					Terjualkan Jaringan Urgasi										
					Terjualkan Kebutuhan Tahun Air Pengelolaan Tahun dan Rawa										
					Terjualkan Urgasi Lainnya										
1	XX	XX			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SUMBERDAYA	Persentase kepatuhan yang dapat terlayani 40,00 persen terlayani 10000 jaringan irigasi dan dalam jaringan irigasi				Meningkatnya pengguna pemanfaatan air irigasi	40,79 persen					
1	XX	XX	XXX		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan kabupaten/kota			Jumlah kelompok tani yang memiliki akses air irigasi	10.000 ha	Meningkatnya jumlah petani pengguna air irigasi	10.000 ha				
1	XX	X	XX	XXX	Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Terbentuk	1 Lembaga	Meningkatnya Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Lembaga				
1	XX	XX	XXX		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Aturan Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	5 dokumen	Terwujudnya Rencana Strategis dan Teknis Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 dokumen				
					Biaya Pengelolaan Air Minum (SPAM)										
					Biaya Pengelolaan Pemeliharaan Air Minum (SPAM)										
					Biaya Pengelolaan Operasional Air Minum										
					Biaya Pengelolaan Pemeliharaan Air Minum										
					Biaya Pengelolaan Pemeliharaan Air Minum										
					Biaya Pengelolaan Pemeliharaan Air Minum										
1	XX	XX	XXX	XXX	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Perdesaan			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun Fungsional yang Meningkatkan	1.000 l/det	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Perdesaan	1.000 l/det				
					Meningkatkan SPAM Kota Kawasan Kawasan Kumpang Sistem										
					Biaya pengelolaan SPAM Perkotaan										
					Biaya Pengelolaan Aplikasi Perkotaan										

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Nama Unit/Nama Sub Unit/Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif SKPD	Kontribusi Anggaran	Catatan Tambahan Indikator dan Anggaran	PERKIRAAN MASUK
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN DAN KEGIATAN		HASIL DAN OUTPUT					TARGET CAPAIAN KINERJA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET				TOLAK UKUR
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]		
					[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]		
					[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]		
					[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]		
					[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]		
					[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]		
					[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]		
1	00	02	2.01	2021	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
					[illegible]							[illegible]	[illegible]		
1	00	1	01	2021	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
					[illegible]							[illegible]	[illegible]		
					[illegible]							[illegible]	[illegible]		
					[illegible]				[illegible]

KODE					Uraian/Nilai(s) Output/Outcome/Sasaran/Indikator Output/ Program/ Kegiatan										
					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
					Pembangunan ...										
					Pembangunan ...										
					Pembangunan ...										
1	XX	1	X	XXXX	Pengembangan Sistem Pengelolaan ...										
					Pengembangan ...										
2	XX	2	X1	XXXX	Pengembangan Sistem ...										
					Pembangunan ...										
					Pembangunan ...										
					Pembangunan ...										
					Pembangunan ...										
					Pembangunan ...										
					Pembangunan ...										
					Pembangunan ...										
					Pembangunan ...										
3	XX	3			Pengembangan ...										
4	XX	4			Pengembangan ...										

KODE					URUSAN/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	TARGET KINERJA						Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Catatan Penting Aktivitas dan Kegiatan	PERKIRAAN BAKU K
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN DAN OUTCOME		HASIL KEGIATAN					CAPAIAN PROGRAM
SUMBER	SUB BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET	KELUARAN	TARGET	OUTCOME	TARGET				TOLAK UKUR
1					2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	04	03	2.04	2020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpadu Skala Permukiman			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Dibangun	1 unit	Terselenggaranya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1 unit				
					Optimalisasi IPLT Kelas Sumber Kabupaten/Kota/Kawasan										
					Pembangunan IPLT Kelas Sumber Kabupaten/Kota/Kawasan										
	03	12	2.03	2019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala			Jumlah Skala yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1 paket	Terbangunnya Skala Kota Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1 Kota				
					Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala										
	03	11	2.03	2018	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			Kapasitas Terpasang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M3/Hari	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0 M3/Hari				
					Pembangunan IPLT Kelas Sumber Kabupaten/Kota/Kawasan				0 M3/Hari						
	03	01	2.03	2016	Pembangunan Unit Pengolah Lumpur Tinja Skala Rumah Tangga/Komunal/Mobile			Jumlah Masyarakat yang Memanfaatkan Fasilitas Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	47 Unit	Meningkatnya Kepatuhan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0 Unit				
					Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala										
	04	07	2.04	2020	Pengelolaan Unit pengolahan Lumpur Tinja			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Fasilitas Sanitasi Sesuai Standar Teknis	18 KK	Terfasilitasi Unit pengolah Lumpur Tinja	18 KK				
					Biaya Perawatan Unit Pengolah Lumpur Tinja										
					Biaya Perawatan Pembangunan SPALD Skala Kota										
					Perbaikan Unit SPALD Komunal Skala Rumah Tangga/Kawasan Permukiman Kumuh										
					Perbaikan Unit SPALD Komunal Skala Kawasan Pariwisata										
					Pembangunan Unit SPALD Komunal Skala Kawasan Pariwisata										
					Pembangunan Unit SPALD Komunal Skala Kawasan Permukiman										
					Pembangunan Unit SPALD Komunal Skala Kawasan Perkantoran										
					Pembangunan Unit SPALD Komunal Skala Kawasan Perdagangan										
					Pembangunan Unit SPALD Komunal Skala Kawasan Industri										
					Pembangunan Unit SPALD Komunal Skala Kawasan Pariwisata										
					Pembangunan Unit SPALD Komunal Skala Kawasan Permukiman										
					Pembangunan Unit SPALD Komunal Skala Kawasan Perkantoran										

KODE					URAIAN	KEADAAN AWAL									
						KEADAAN PROGRAM		KEADAAN SUB KEGIATAN		KADI INDIKATOR					
						TOLAK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA						Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Lokasi Penting (Kelurahan, Kec. Kegiatan)	PERKIRAAN BIAYA
						Capaian Program		Keluaran (Output) Kegiatan		Hasil/ Manfaat					Target Capaian Angka
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Tolok Ukur	Target	Indikator	Target	Indikator	Target				Tolok Ukur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	00	00	0.00	0000	Pengendalian dan Pengawasan Perlindungan Anak di Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota			Jumlah Kelurahan/ Desa Layak Anak di Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dimonitoring	0 Kelurahan/ Desa	Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pelaksanaan Program Layak Anak	Lingkungan Strategis Daerah				
					Sub total Perlindungan Khusus yang Dialami Anak (PKA) yang Ada										
					Sub total Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Ditangani										
					Sub total Anak Korban Tindak Pidana yang Ditangani										
					Sub total Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual yang Ditangani										
					Sub total Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan yang Ditangani										
					Sub total Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis yang Ditangani										
					Sub total Anak Korban Pornografi yang Ditangani										
					Sub total Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran yang Ditangani										
					Sub total Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Orang Tuanya yang Ditangani										
					Sub total Anak Korban Korban Jaringan Terorisme yang Ditangani										
					Sub total Anak Korban Penyandang Disabilitas yang Ditangani										
					Sub total Anak Korban Perlakuan Salah Lainnya yang Ditangani										
1	02	01	0.00	0010	Penyusunan Kebijakan Terkait Perlindungan Anak Lingkungan Strategis			Jumlah Kebijakan Kelurahan/ Desa Perlindungan Anak Lingkungan Strategis	1 Kebijakan	Terlaksananya Kebijakan Perlindungan Anak Lingkungan Strategis	Kebijakan		APBD Kota Kabupaten/Kota		
					Sub total Penyusunan Kebijakan Lingkungan Strategis										
1	00	00	0.00	0000	Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Anak di Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (PPA), Kelompok Kerja Konvensi Hak Anak (KKHA), Forum Anak Kabupaten/Kota, Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (PPA), Duta Anak, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA), Pos Pelayanan Terpadu (PPT), Forum Komunikasi Pengasuhan Alternatif (FKPA), dan/atau Kelembagaan Lainnya			Jumlah Kelembagaan Perlindungan Anak di Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (PPA), Kelompok Kerja Konvensi Hak Anak (KKHA), Forum Anak Kabupaten/Kota, Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (PPA), Duta Anak, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA), Pos Pelayanan Terpadu (PPT), Forum Komunikasi Pengasuhan Alternatif (FKPA), dan/atau Kelembagaan Lainnya di Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (PPA)	0 Kelembagaan	Terbentuknya Kelembagaan Perlindungan Anak di Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (PPA), Kelompok Kerja Konvensi Hak Anak (KKHA), Forum Anak Kabupaten/Kota, Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (PPA), Duta Anak, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA), Pos Pelayanan Terpadu (PPT), Forum Komunikasi Pengasuhan Alternatif (FKPA), dan/atau Kelembagaan Lainnya di Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (PPA)	Kelembagaan		APBD Kota Kabupaten/Kota		
					Sub total Pembentukan Kelembagaan Perlindungan Anak di Lingkungan Strategis										
					Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak di Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
2	00	00			Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Lain Lembaga Masyarakat	Nama Lembaga yang Dibina Pengurus dan Pengelolanya (Nama - jenis kelamin)	40 Lembaga			Meningkatnya Kualitas Pengurus dan Pengelolanya yang Lebih Meratai	20 Orang				
3	00	00	0.00		Pemberdayaan Keluarga dan Lembaga Masyarakat Lainnya			Jumlah Kelembagaan Pengelola Kegiatan Pemberdayaan Keluarga	20 Kelembagaan	Meningkatnya Kelembagaan Pengelola Kegiatan Pemberdayaan Keluarga	20 Kelembagaan				

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
					[illegible]							[illegible]			
					[illegible]							[illegible]			
					[illegible]							[illegible]			
					[illegible]							[illegible]			
					[illegible]								APBD		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	[illegible]		
					[illegible]							[illegible]	[illegible]		
					[illegible]							[illegible]	[illegible]		
					[illegible]							[illegible]	[illegible]		
					[illegible]							[illegible]	[illegible]		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA
						TOLOK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET				TOLOK UKUR
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembangunan [illegible]							[illegible]	APBD		
					Pembangunan Gedung [illegible] Sumedang							[illegible]	APBD		
					Pembangunan Gedung [illegible] Sumedang							[illegible]	APBD		
					[illegible] Sumedang							[illegible]	APBD		
					[illegible] Sumedang							[illegible]	APBD		
					[illegible] Sumedang							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible] Sumedang							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible] Sumedang							[illegible]	APBD		
					[illegible] Sumedang							[illegible]	APBD		
					Pembangunan [illegible]							[illegible]			
					Pembangunan [illegible]							[illegible]	APBD		
					[illegible] Sumedang							[illegible]	[illegible]		
					[illegible]							[illegible]	[illegible]		
					[illegible]							[illegible]	[illegible]		
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]			
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

KODE					Arsitektur Bisnis Proses (Nama Layanan, Aktivitas, Dan Program/ Kegiatan)	INDIKATOR KINERJA						Pagu Anggaran (Rp)	Unit/SKPD Owner	Catatan Tambahan Arsitektur Sub Fungsional	PENGUKURAN INDIKATOR
						Capaian Kinerja		Kegiatan dan Anggaran		Waktu Kinerja					Target Indikator Kinerja
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Output	Target	Indikator	Target	Indikator	Target				Tolok Ukur
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0.01	4020	Pengelolaan Jaga Laut	Koordinasi dan fasilitasi dalam Kondisi Laut dalam pemeliharaan, pengelolaan, efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan publik, meningkatkan (dasimo, pemeliharaan kewajiban), dan memfasilitasi dengan instansi strategis.		Jumlah Tindakan Jaga Laut yang Dilakukan	1 Aktivitas/Unit	Terlaksananya Jaga Laut	1 Aktivitas/Unit	1.000.000.000,00	[unit] [sub-unit]		Pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas, seperti aktivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, (misal) kompetensi) kesesuai penggunaan (alat), dan kesesuaian dengan program strategi. Ini a Bisnis dapat ke kapitan. Disana yang sudah ada di a. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
			1.02	4020	Pengawasan Perizinan, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan dengan Laut serta Pemanfaatan Teknis Pengembangan Jalan dan Antisipasi	Pelaksanaan pengawasan perizinan yang sesuai ketentuan, kebijakan, alat strategi pengembangan jaringan jalan, serta pemanfaatan teknis teknis yang efektif dengan baik, sesuai dengan standar. Alat ini yang berlaku dan dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk penggunaan dan pemberian yang sesuai.		Jumlah Kebijakan/ Pemanfaatan, Fasilitasi, Strategi, dan Teknis Pengembangan dengan Laut serta Pemanfaatan Teknis Pengembangan Jalan dan Antisipasi yang Dilakukan	1 Aktivitas/Unit	Terlaksananya Pengawasan, Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan dengan Jalan Laut Pemanfaatan Teknis Pengembangan dan Jalan Antisipasi	1 Aktivitas/Unit	1.000.000.000,00	[unit] [sub-unit]		Pelaksanaan efektif dan efektivitas pengawasan perizinan dan kebijakan strategi pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan. Contohnya: kualitas, efektivitas, (misal), kesesuaian pemberian, dan kesesuaian pemberian kewajiban (misal) yang memenuhi dan (misal) jumlah, dan strategi yang efektif. Bisnis berkesinambungan (misal) 100 izin dan yang berkesesuaian dan sesuai dengan kebijakan memenuhi.
					Pemanfaatan Teknis Jalan dan Antisipasi											
			2.01	4020	Pengelolaan Terpadu Pengembangan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Laut	Pemanfaatan Jalan yang sesuai dalam yang sesuai dalam kewenangan kabupaten/kota, dan Strategi dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kualitas jalan dan memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan.		Terlaksana Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Laut yang Dikelola Pemanfaatannya	1km	Terlaksananya Pengelolaan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Laut	1km	1.000.000.000,00	[unit] [sub-unit]		Terkait pada kegiatan terhadap kegiatan/Unit/sesuai dari satu/jalan pengelolaan, meliputi (contoh): (PANJANG), (LEBAR), (MATERIAL), (KONDISI), (MATERIAL), (misal) Kota Jalan, (efisiensi) anggaran, pemanfaatan kapasitas yang ada. Dan (misal) indikator pengawasan: Pengawasan harus efektif dan sesuai dengan kondisi dan fasilitas jalan (misal) efektif, sehingga meningkatkan kualitas dan fasilitas jalan (misal) efektif di Kabupaten/Kota.

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA								
						CAPAIAN PROGRAM		HASIL KEGIATAN		KELUARAN KEGIATAN				TARGET CAPAIAN KINERJA
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			TOLAK UKUR
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.23	2023		Penggantian Gedung	Jumlah Gedung yang berhasil digantikan, serta dilakukan pendataan terhadap kerusakan dan kebutuhan pembaruan, melalui inspeksi penggantian gedung dapat dilihat dari jumlah gedung yang diganti, meskipun jumlah yang diganti masih belum bisa sesuai dengan		Persyaratan yang telah dan penggantian	70 Gedung	Pengantian Gedung	70 Gedung	11.017.200.000,00			Berhasil ganti gedung anggaran, meliputi kesehatan pembangunan dapat dan, kemacetan, inspeksi penggunaan, berhasil, Ingkungan, Gedung Untuk, dan pemerintah. Dan juga kesempurnaan membuat, sebelumnya upaya dan
					Penggantian Gedung Gedung		3 unit		3 unit		1 unit	3.745.800.000,00	UNIT/UNIT	
					Penggantian Gedung Gedung di Kecamatan Pulau Jawa Tengah Gedung Gedung		2 unit		2 unit		1 unit	3.387.500.000,00		
					Penggantian Gedung Gedung di Gedung Gedung Gedung Gedung							3.723.500.000,00		
		2.24	2023		Pembangunan Jalan	Terbangunnya gedung yang baik dan aman dengan dengan yang ditetapkan dalam undang		Gedung yang dibangun		Pembangunan Jalan				
					Pembangunan Jalan									
		2.25	2023		Pemeliharaan Jalan	Terbangunnya gedung yang baik dan aman dengan dengan yang ditetapkan dalam undang	4 km	Gedung yang dibangun	50,000 km	Pembangunan Gedung Jalan	50,000 km	400.000.000.000,00		
					Pemeliharaan Jalan Gedung Gedung Gedung Gedung				0,17		0,17	2.4.250.000,00		
					Pemeliharaan Jalan Gedung Gedung Gedung Gedung				0,25		0,25	250.000.000,00		
					Pemeliharaan Jalan Jalan Gedung Gedung Gedung Gedung Gedung Gedung				0,17		0,17	2.4.250.000,00		
					Pemeliharaan Jalan Gedung Gedung				1,00		1,00	100.000.000,00	UNIT/KM	
					Pemeliharaan Jalan Jalan Gedung Gedung				0,04		0,04	4.000.000,00	UNIT/KM	
					Pemeliharaan Jalan Jalan Gedung Gedung				0,08		0,08	8.000.000,00	UNIT/KM	
					Pemeliharaan Jalan Jalan Gedung Gedung				0,08		0,08	8.000.000,00	UNIT/KM	
					Pemeliharaan Jalan Jalan Gedung Gedung				1,00		1,00	100.000.000,00	UNIT/KM	
					Pemeliharaan Jalan Jalan Gedung Gedung				1,00		1,00	100.000.000,00	UNIT/KM	
					Pemeliharaan Jalan Jalan Gedung Gedung				1,00		1,00	100.000.000,00	UNIT/KM	
					Pemeliharaan Jalan Jalan Gedung Gedung				1,00		1,00	100.000.000,00	UNIT/KM	
					Pemeliharaan Jalan Jalan Gedung Gedung				1,00		1,00	100.000.000,00	UNIT/KM	
					Pemeliharaan Jalan Jalan Gedung Gedung				1,00		1,00	100.000.000,00	UNIT/KM	

KODE					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Unsur/Aspek/Kriteria/Variabel/Sub Variabel	INDIKATOR HASIL									
						Indikator Hasil Sebelum		Indikator Hasil Saat Dicatat		Indikator Hasil Setelah		Pagu Indikator Hasil	Sumber Data	Catatan Penting Indikator Sub Hasil Hasil	PENGUKURAN BASELINE
						Tolok Ukur	Vol/Thn	Indikator Hasil	Target	Indikator Hasil	Target				Tolok Ukur
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Catatan Penting Alokasi Anggaran	PENDELEGASIAN WEWENANG
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN DAN HASIL KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					TARGET CAPAIAN PERUBAHAN
Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				TOLAK UKUR
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2.01		Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya upaya-upaya yang terkait adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan yang Adalah Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Terkait dengan Pembangunan dan Lainnya		Persentase Upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkat	Persentase dari Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Meningkat				
			2.01	0202	Perumahan Jendela	Dari Jumlah yang Berhasil Ditindaklanjuti, satu dengan yang Ditindaklanjuti Hanya Jendela dan Kemudahan Penggunaan Jalan. Dalam Hasil Ditindaklanjuti Jendela dapat Efektif dan Jendela yang Terdiri Berfungsi dengan Baik dan akan untuk digunakan sesuai standar yang berlaku.		Pembangunan Jendela	Terlaksana	Terlaksananya Jendela	Terlaksana				
					Ke Indikator Jendela Rumah 1 (Lima ratus - Unggul)										
					Ke Indikator Jendela Rumah (Lima - Unggul)										
					Ke Indikator Jendela Rumah Tidak Berfungsi (Lima - Unggul)										
					Ke Indikator Jendela Tidak Berfungsi (Lima - Kurang)										
					Ke Indikator Jendela Tidak Berfungsi (Lima - Kurang)										
					Ke Indikator Jendela Tidak Berfungsi (Lima - Kurang)										
					Ke Indikator Jendela Tidak Berfungsi (Lima - Kurang)										

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA									
						Capaian Program		Keluaran (Output) Kegiatan dan Sub Kegiatan		Hasil (Outcome)		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prakiraan Maju
						Capaian (Outcome)	Target	Indikator	Target	Indikator	Target				Target
1					2	3		4		5		6	7	8	9
			2.05		Perlindungan Perempuan										
					Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Serta Lembaga Ketahanan Masyarakat				5 Kelompok						
			2.06		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
				2.06.01	Pelayanan Kontrasepsi										
					Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
			2.07		Kesehatan										
				2.07.01	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
				2.07.02	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
				2.07.03	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir										
				2.07.04	Pelayanan Kesehatan Balita										
				2.07.05	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
				2.07.06	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif										
				2.07.07	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut										
				2.07.08	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi										
				2.07.09	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus										
				2.07.10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)										
				2.07.11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
				2.07.12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV										
				2.07.13	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Penyalahgunaan Napza										
				2.07.14	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Vitamin A										
				2.07.15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium										
				2.07.16	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Zat Besi										
				2.07.17	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Energi Kronis										
				2.07.18	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Energi Protein										
				2.07.19	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Folat										
				2.07.20	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Kalsium										
				2.07.21	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Vitamin B1										
				2.07.22	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Vitamin B2										
				2.07.23	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Vitamin B12										
				2.07.24	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Vitamin C										
				2.07.25	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Vitamin D										
				2.07.26	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Vitamin E										
				2.07.27	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Vitamin K										
				2.07.28	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Kalium										
				2.07.29	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Magnesium										
				2.07.30	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Seng										
				2.07.31	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Kolesterol										
				2.07.32	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Protein										
				2.07.33	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Karbohidrat										
				2.07.34	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Lemak										
				2.07.35	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Air										
				2.07.36	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Serat										
				2.07.37	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Amino										
				2.07.38	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Lemak										
				2.07.39	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Linoleat										
				2.07.40	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Linolenat										
				2.07.41	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Arakidonat										
				2.07.42	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.43	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Eicosapentaenoat										
				2.07.44	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.45	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.46	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.47	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.48	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.49	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.50	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.51	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.52	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.53	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.54	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.55	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.56	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.57	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.58	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.59	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.60	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.61	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.62	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.63	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.64	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.65	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.66	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.67	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.68	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.69	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.70	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.71	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.72	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.73	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.74	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.75	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.76	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.77	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.78	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.79	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.80	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.81	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.82	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.83	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.84	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.85	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.86	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.87	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.88	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.89	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.90	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.91	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.92	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.93	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.94	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.95	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.96	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.97	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.98	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										
				2.07.99	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosahexaenoat										
				2.07.100	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Kekurangan Asam Docosapentaenoat										

URUSAN					Urusan/ Bidang Urusan/ Nama Unpras/ Sub-unit/ Sub-Kegiatan	INDIKATOR KINERJA						Pagu Anggaran (Rp)	Catatan Penting	Indikator Tambahan (Apabila Ada)	PERKIRAAN BIAYA
						CAPAIAN PROGRAM		HASIL KEGIATAN DAN KELUARAN KEGIATAN		KINERJA KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA
						TOLAK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET				Tahun 2024
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

KODE					URAIAN/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	INDIKATOR DAN TARGET									
						CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Catatan Penting Rekomendasi Perubahan	PERUBAHAN (BARU)
						TOLAK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET				TOLAK UKUR
			2.22												

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PERUBAHAN SEBELUM								PERUBAHAN SESUDAH	
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN/HASIL KEGIATAN		MASUKAN		Pagu Sebelum Ubah	Sesudah Ubah	Alasan Perubahan	CAPAIAN PROGRAM
SUMBER	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	TARGET				TOLAK UKUR
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KODE					Uraian/Sifat Kinerja Output Hasil Impact Dampak dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi (Kab/Kota, Kec, Desa)	PERSPEKTIF MASYA
						TOLAK UKUR	TARGET								SUMBER DAYA MANUSIA
								INDIKATOR	SATUAN	TOLAK UKUR	TARGET				

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)						Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kelompok Sasaran
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1.04	0004	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Dokumen	Pendaftaran Penduduk	100 Dokumen				
					Pelayanan Pelaporan Kependudukan Pengguna Akhir Sistem Informasi Kependudukan				100 Dokumen		100 Dokumen				
			1.05	0004	Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil dan Pelaporan Hasil Pencatatan Sipil	3 Laporan	Pencatatan Sipil	3 Laporan						
					Pelayanan Akta Pencatatan Sipil				3 Dokumen		3 Dokumen				
JUMLAH															

BAB IV

Rencana kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan renja berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dan mengacu pada Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten sumedang merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menanggah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUTR. Keduanya merupakan penjabaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyeleriggaraan pemerintah daerah, dan peraturan menteri dalam negeri 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan di atur secara rinci dalam rencana kerja (renja).

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2026 telah mengacu kepada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yaitu terdiri dari 8 program, 21 kegiatan dan 93 sub kegiatan yang di jabarkan terlampir pada lampiran tentang *Rumusan*

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. SUMEDANG
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	RENCANA CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2026	PENERIMAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BELUM TERCAPAI TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET / PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		TARGET PENCAPAIAN URUSAN DAN TATA RUANG						870.681.842.840,00						276.836.280,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT SERTA/ATAU URUSAN PILIHAN DASAR						870.681.842.840,00						276.836.280,00
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PENGELOLAAN URUSAN DAN PENATAAN RUANG						870.681.842.840,00						276.836.280,00
1	1.03.01	PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			81 Nilai	10.811.678.240,00					-	11.111.957,00
	1.03.01.2.01	Penyusunan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			29 Dokumen	178.630.000,00			Mendukung terlaksananya pelayanan publik, Sesuai visi misi kepala daerah dan pemerintah daerah, sesuai tupoksi, SPM, SPP dan Indikator	-	Para pemangku kepentingan (stake holder)	-	194.243.000
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.806.842,00	Ade Bunsetiang, Sumedang Selatan, Regol kulon	UMUM, ALOKASI UMUM, DAUD	Mendukung terlaksananya pelayanan publik, Sesuai visi misi kepala daerah dan pemerintah daerah, sesuai tupoksi, SPM, SPP dan Indikator	-	Para pemangku kepentingan (stake holder)		10.806.842
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD												

NO	KODE	URAIAN / INDIKATOR KEGIATAN / PROGRAM / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / JENIS KEGIATAN	INDIKATOR PENGUKURAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (NILAI) PENGUKURAN (UPK)	REALISASI CAPAIAN KINERJA (KPI) TAHUN LALU	PENERIMAN CAPAIAN TARGET KINERJA (KPI) TAHUN INI	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PENERIMAN NILAI KEGIATAN TAHUN 2027	
							TARGET (KPI)	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(contoh) Dokumen / Alat Ukur/ dll. Laporan Hasil Kuantifikasi Penyerapan Bahasa (-BKA-RMS)				1 Dokumen	14.594.400,00	Kab. Sumedang, Jatinangor, Bandung, Yogyakarta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat / memperluas publik, fokus pada kondisi, yang mampu untuk pilihan dan/atau dan dan/ dan/ atau, fokus, terfokus, dll. dan ya mendukung	-	Para pelanggan kepentingan (publik hukum)		14.772,55
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Pengadaan Sidang Perubahan (SIDA-SAPS)													
			Jumlah Dokumen Perubahan (BKA-SAPS) dan Laporan Hasil Kuantifikasi Penyerapan Dokumen Perubahan (BKA-SAPS)				1 Dokumen	7.350.400,00	Kab. Sumedang, Jatinangor, Bandung, Yogyakarta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat / memperluas publik, fokus pada kondisi, yang mampu untuk pilihan dan/atau dan dan/ dan/ atau, fokus, terfokus, dll. dan ya mendukung	-	Para pelanggan kepentingan (publik hukum)		4.411,00
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Pengadaan SPA (SPA)													
			Jumlah Dokumen SPA (SPA) dan Laporan Hasil Kuantifikasi Penyerapan Dokumen (SPA-SAPS)				1 Dokumen	6.750.800,00	Kab. Sumedang, Jatinangor, Bandung, Yogyakarta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat / memperluas publik, fokus pada kondisi, yang mampu untuk pilihan dan/atau dan dan/ dan/ atau, fokus, terfokus, dll. dan ya mendukung	-	Para pelanggan kepentingan (publik hukum)		7.045,00
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Pengadaan Perubahan (SPA-SAPS)													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / OUTCOME / SUB KEGIATAN	INDIKATOR/PENGUKURAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGKA PERSENTASE (%)	REALISASI CAPAIAN KINERJA (%) TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR TPPS TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN NOLU SEBELUMNYA TAHUN 2027	
							TARGET RPJM	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENDERITA			TARGET	PAGU INDIKATIF
											PENDERITA	Outcome			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kabupaten Pendidikan DPA (KKD) dan Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dokumen Pendidikan APM (KKD)				1 Dokumen	5.628.470.000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Rajadesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemerintah Lembaga publik, Sekolah dan Komunitas, serta masyarakat yang terdampak kegiatan dan pemangku akan. RAKOR, Perhitungan, SOP, dan ke hidrologi	-	Para pemangku kepentingan (publik hidrologi)		5.431.05
	5.03.01.2.01.0004	Amplifikasi dan Penyebaran Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (KKD)													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP) dan Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (KKD)				10 Laporan	50.525.870.000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Rajadesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat umum, Lembaga publik, Sekolah dan Komunitas, serta masyarakat yang terdampak kegiatan dan pemangku akan. RAKOR, Perhitungan, SOP, dan ke hidrologi	-	Para pemangku kepentingan (publik hidrologi)		57.361.00
	5.03.01.2.01.0010	Fasilitasi Kantor Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Kantor Kerja Pada Kantor Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Kantor Kerja	28.999.870.000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Rajadesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat umum, Lembaga publik, Sekolah dan Komunitas, serta masyarakat yang terdampak kegiatan dan pemangku akan. RAKOR, Perhitungan, SOP, dan ke hidrologi	-	Para pemangku kepentingan (publik hidrologi)		31.340.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERUBAHAN (SPD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2026	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PERUBAHAN						RELEVANSI SASARAN	PRAKIRAAN RENJA KINERJA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	RASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.2.03	Administrasi Kantor dan Penunjang Urusan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			14 Dokumen	14.261.640.000,00			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas, kelancaran pelaksanaan tugas, dan terlaksana tertib administrasi keuangan, aset, kepegawaian, dan perlengkapan sesuai ketentuan yang berlaku	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang	-	14.645.214,50
	1.03.01.2.03.0021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				181 Orang/Bulan	18.709.970.119,00	Kab. Semarang, Ungaran, Bandan, Pemerintah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyediakan administrasi pelaksanaan tugas, kelancaran pelaksanaan tugas, terlaksana tertib administrasi keuangan, aset, kepegawaian, dan perlengkapan sesuai ketentuan yang berlaku		Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang		19.450.225,00
	1.03.01.2.03.1019	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12.243.810,00	Kab. Semarang, Ungaran, Bandan, Pemerintah /	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyediakan administrasi pelaksanaan tugas, kelancaran pelaksanaan tugas, terlaksana tertib administrasi keuangan, aset, kepegawaian, dan perlengkapan sesuai ketentuan yang berlaku	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang		14.401,00
	1.03.01.2.03.1020	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN SEMUA UPO TAHUN 2024	PENARGAN CAPAIAN TARGET SEMUA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PENDORONG BELUI RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET KERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			Tertinggi	Pagu Indikatif (Rp)
											Non-Strategis	Outcome			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Bidang Transfer Pemerintah Daerah (DAPD) dan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran (DAPD)				12 Laporan	11.130.000.00	Kab. Semarang, Kecamatan Ungaran, Pringsewu	Dana ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung pelayanan publik, bukan non-strategis, tetapi masih efisien yang dapat dan pemerintah dan fungsi, meliputi, dll. dan ga mendukung	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang		10.375.00
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pengelola Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pengelola Daerah	-			12 Laporan	10.000.000.00			Mendukung pelayanan publik, bukan non-strategis, tetapi masih yang dapat dan pemerintah dan fungsi, meliputi, dll. dan ga mendukung	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang	-	100.000.00
	1.02.01.2.03.0001	Pengelolaan Penerimaan Kabupaten Barang Milik Daerah (SKPD)													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD)				9 Dokumen	10.000.000.00	Kab. Semarang, Kecamatan Ungaran, Pringsewu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung pelayanan publik, bukan non-strategis, tetapi masih efisien yang dapat dan pemerintah dan fungsi, meliputi, dll. dan ga mendukung	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang		10.000.00
	1.03.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	PENGIRIM CAPAIAN TARGET RPJD TAHUN AKHIR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ARC DINKOP BAGANSIAPI	PENARIKAN BALIK RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET OPD	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											PROGRAM	KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Rekapitulasi dan Pengawasan Laporan Barang Milik Daerah yang [illegible]				13 Laporan	[illegible]	Kab. Sumedang, Sumedang, Kadaton, Rancakalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan [illegible]	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		[illegible]
	1.03.01.2.03.0010	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Mitra													
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Mitra				1 Laporan	[illegible]	Kab. Sumedang, Sumedang, Darmaraja, Rancakalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan [illegible]	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		[illegible]
	1.03.01.2.20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-			90 Nilai	[illegible]			Mempertahankan [illegible]	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	-	[illegible]
	1.03.01.2.20.0010	Pendidikan dan Pengadaran Administrasi Kepegawaian													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / DAT/OUTPUT / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	KELUARAN CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2025	PENERIMAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KENDARA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											KAUSDAHAL	DAERAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pemilihan dan Pengadaan Administrasi Pengadaan				3 Dokumen	12.700.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Rancakalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung pelayanan publik, fokus pada layanan, serta mulai untuk pada aplikasi dan pemerintah lebih fokus pada, dan ke masyarakat	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		30.000.000
	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Intern Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dan Pelaporannya Status Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Rancakalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan pelayanan publik, fokus pada layanan, serta mulai untuk pada aplikasi dan pemerintah lebih fokus pada, dan ke masyarakat	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		23.000.000
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kepegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kepegawai				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Rancakalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan pelayanan publik, fokus pada layanan, serta mulai untuk pada aplikasi dan pemerintah lebih fokus pada, dan ke masyarakat	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		23.000.000
	1.03.01.2.05.0006	Pemeliharaan Pegawai yang Pensiun													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PERUBAHAN						ARLOJAMPUH DAERAH	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET AWAL	PAGU PERKIRAAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											RANGKING	CADANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Regulasi Tersedia yang Diterapkan				73 Orang	13.440.000.00	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Sumedang Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperhatikan kepentingan umum, Norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hukum, agama, adat, dan peraturan lainnya	-	Pejabat Eselon PU PR Kabupaten Sumedang		13.936.00
	1.03.01.2.03.0010	Terselesaikannya Penetapan Peraturan Daerah/Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Orientasi Pendidikan Pemerintahan/Lainnya				30 Orang	20.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Pasanggrahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperhatikan kepentingan umum, Norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hukum, agama, adat, dan peraturan lainnya	-	Pejabat Eselon PUTR kabupaten Sumedang		33.000.00
	1.03.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselesaikan Pengelolaan Administrasi Umum perangkat daerah	-			100 Persen	184.852.443,00			Memperhatikan kepentingan umum, Norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hukum, agama, adat, dan peraturan lainnya	-	Pejabat Eselon PUTR kabupaten Sumedang	-	1.870.000.00
	1.03.01.2.10.0001	Penyelesaian Administrasi Kredensi Lancar/Pemenuhan Sarana dan Kantor													

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Awal Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2023	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pasar Kumuskan Inspektur Lokal/Pemerintah Bangunan Kantor yang Dievaluasi				1 Paket	19.934.800,00	Kab. Sumedang, Kotadesa, Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertimbangkan aspek Kumuskan tersebut, memperhatikan aspek, aspek dan pertimbangan aspek tertentu, tertentu, dll, dan ya mempertimbangkan		Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		120.000.000
	1.22.01.2.05.0002	Pemerintah Perekam dan Pelanggaran Pasar													
			Jumlah Pasar Pembantu dan Pelanggaran Kantor yang Dievaluasi				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Sumedang, Kotadesa, Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertimbangkan aspek, kumuskan tersebut, memperhatikan aspek, aspek dan pertimbangan aspek tertentu, tertentu, dll, dan ya mempertimbangkan		Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		100.000.000
	1.22.01.2.06.0002	Pemerintah Pelatihan Rumah Tangga													
			Jumlah Pasar Pendaftar Rumah Tangga yang Dievaluasi				12 Paket	100.000.000,00	Kab. Sumedang, Kotadesa, Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertimbangkan aspek, kumuskan tersebut, memperhatikan aspek, aspek dan pertimbangan aspek tertentu, tertentu, dll, dan ya mempertimbangkan		Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		100.000.000
	1.22.01.2.08.0004	Pemusatkan Bahan Logistik Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERUBAHAN RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BELUM MENCAPAI TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											RASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Rahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.999.999,00	Kec. Sumalang, Sumalang, Siabu, Tegallalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung kelancaran pelayanan publik, kinerja dan birokrasi, serta memenuhi standar kualitas pelayanan dan administrasi agar kantor berfungsi optimal, sesuai dengan standar	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumalang		220.304.224
	5.03.01.2.03.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	99.210.000,00	Kec. Sumalang, Sumalang, Siabu, Tegallalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mendukung kelancaran pelayanan publik, kinerja dan birokrasi, serta memenuhi standar kualitas pelayanan dan pemenuhan agar kantor berfungsi optimal, sesuai dengan		Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumalang		220.304.224
	5.27.01.2.09.0009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	97.220.000,00	Kec. Sumalang, Sumalang Selatan, Tegallalang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mendukung kelancaran pelayanan publik, kinerja dan birokrasi, serta memenuhi standar kualitas pelayanan dan pemenuhan agar kantor berfungsi optimal, sesuai dengan	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumalang		220.000.000
	1.20.01.2.03.0016	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RPJMD/RA Saat	REALISASI CAPAIAN KINERJA S/D TAHUN LALU	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA DPO TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KINERJA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	HASIL INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRAKIRAAN			TARGET	HASIL INDIKATOR
											KEUSKESAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pusdatin Pengelolaan Pajak Kendaraan dan Komunikasi (SKPD)				12 Laporan	Rp 720.000.000	Kab. Semarang, Kecamatan, Desa/kel, Regelbesluit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan pengelolaan pajak, laporan dan informasi pemerintah, khusus pajak dan pemerintah lainnya, perlu, melibatkan, SKP, dan pa masyarakat	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang		Rp 240.000
	1.03.01.2.03.0004	Pengelenggaraan Pajak Kendaraan dan Komunikasi (SKPD)													
			Jumlah Laporan Pengelenggaraan Pajak Kendaraan dan Komunikasi (SKPD)				12 Laporan	Rp 240.000.000	Kab. Semarang, Kecamatan, Desa/kel, Regelbesluit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan pengelolaan pajak, laporan dan informasi pemerintah, khusus pajak dan pemerintah lainnya, perlu, melibatkan, SKP, dan pa masyarakat	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang		Rp 240.000
	1.03.01.2.05.0013	Pemeliharaan Ims Elektronik (SKPD)													
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Ims Elektronik (SKPD)				12 Dokumen	Rp 240.000.000	Kab. Semarang, Kecamatan, Desa/kel, Regelbesluit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan pengelolaan pajak, laporan dan informasi pemerintah, khusus pajak dan pemerintah lainnya, perlu, melibatkan, SKP, dan pa masyarakat	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang		Rp240.000
	1.03.01.2.20.0011	Koleksi Pelaksanaan Dokm Pemerintahan Berbasis Elektronik (SKPD)													

NO	KODE	URAIAN / SEKOLAH/ DINAS/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA (SPM)	REALISASI CAPAIAN SPM S/D TAHUN 2024	PENERIMAAN CAPAIAN TARGET SPM TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RELEVANSI BIDANG	PERKIRAAN BESAR RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											RASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Dokumen Pelaksanaan Dalam Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD				5 Dokumen	0,00	Kab. Semarang, Kecamatan Suruh, Kecamatan Tengaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, Kesiapan dan kesiapan menghadapi Kinerja pemerintah agar lancar, berbasis SOP, dan pelaporan	-	Perangkat Daerah PUTR Kabupaten Semarang		20.250.000
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdaftar				100 persen	400,00 (100,00)			Meningkatkan pelayanan publik, kesiapan dan kesiapan menghadapi kinerja pemerintah agar lancar, berbasis SOP, dan pelaporan	-	Perangkat Daerah PUTR Kabupaten Semarang		5.400.000.000
	1.03.0.1.2.07.0001	Pengadaan Sandaran/Penempatan Office atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perjalanan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	197.500.000,00	Kab. Semarang, Kecamatan Tengaran, Ungaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan kelancaran publik, fleksibel dan terkendali, waktu tepat, efisien dan pemberian awal, kinerja, berbasis, SOP, dan pelaporan	-	Perangkat Daerah PUTR Kabupaten Semarang		1.200.000.000
	1.03.01.2.01.0001	Pengadaan Sandaran/Dinas Operasional atau Lapangan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA SPE TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA KINERJA 2027	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	630	Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Boyolali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung terwujudnya pelayanan publik, fleksibilitas mobilitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan pemenuhan aset kendaraan dinas operasional yang efisien dan efektif	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang		420.000.000
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Berat													
			Jumlah Unit Alat Berat yang Disediakan				4 Unit	5.000	Kab. Semarang, Kabupaten Kendal, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung terwujudnya pelayanan publik, fleksibilitas mobilitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan pemenuhan aset kendaraan dinas operasional yang efisien dan efektif	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang		1.260.000.000
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil													
			Jumlah Tipper Mobil yang Disediakan				300 Unit	9.00	Kab. Semarang, Boyolali, Kabupaten Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung terwujudnya pelayanan publik, fleksibilitas mobilitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan pemenuhan aset kendaraan dinas operasional yang efisien dan efektif	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Semarang		270.000.000
	1.03.01.2.07.0016	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (SPE)	WILAYAH (LOKASI) REKLIN (SPE) TAHUN JEDA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REKLIN (SPE) TAHUN SUDI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU PERCAPAIAN TAHUN LALU	
							TARGET (%)	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Pendaran dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	15.281.700.00	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Rancakalong	23000 dr.28000 (40,00 (5%))	Menyediakan infrastruktur publik, Tersedia dan terpelihara sarana-sarana umum dan pemerintah dapat berjalan dan berkembang, jalan, dan sarana lainnya	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		400.000.000
	5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor yang Disediakan				5 Unit	200.000.000.00	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Rancakalong	10000 dr.20000 (200.00 (5%))	Menyediakan infrastruktur publik, Tersedia dan terpelihara sarana-sarana umum dan pemerintah dapat berjalan dan berkembang, jalan, dan sarana lainnya	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		2.000.000.000
	5.03.01.2.08	Pemeliharaan Jalan Prioritas Lintas Perkotaan Daerah	Jumlah Lapisan Perkerasan Jalur Prioritas/Utama Perkotaan Daerah	-			12 Lapisan	2.175.281.000.00			Menyediakan infrastruktur publik, Tersedia dan terpelihara sarana-sarana umum dan pemerintah dapat berjalan dan berkembang, jalan, dan sarana lainnya	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	-	2.275.362.000
	5.03.01.2.09.0002	Pengaspalan Jalan Kerusakan Tertinggi Dalam Kab Sumedang													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET AKHIR TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET AKHIR	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROPENSITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (R
											NASIONAL	DAERAH			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Jumlah Laporan Pengaduan dan Konsultasi Sumber Daya Air dan Lahan yang Ditindaklanjuti				110 Laporan	440.004.400.000	Kab. Sumedang, Kecamatan Sukasari, Rancakalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperbaiki infrastruktur publik, Kualitas dan kondisi, serta meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dari kerusakan, perbaikan, dll.	-	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		220.000.000
	1.03.01.2.05.0003	Pengelolaan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Irigasi													
			Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Irigasi yang Ditindaklanjuti				11 Laporan	55.000.000.00	Kab. Sumedang, Kecamatan Sukasari, Rancakalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperbaiki infrastruktur publik, Kualitas dan kondisi, serta meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dari kerusakan, perbaikan, dll.		Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		110.000.000
	1.03.01.2.05.0004	Pengelolaan dan Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan				121 Laporan	1.477.214.000.00	Kab. Sumedang, Kecamatan Sukasari, Rancakalong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperbaiki infrastruktur publik, Kualitas dan kondisi, serta meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dari kerusakan, perbaikan, dll.	Meningkatkan Masyarakat dan Stakeholder yang terlibat, Berupaya Transparan, Sesuai Dengan PERDA, Mengikuti Undang-Undang Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas PUTR Kabupaten Sumedang		1.870.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PROGRAM CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KRC UNTUK SASARAN	PERKIRAAN BAJU KINERJA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF ()
											WAJIB/MIN.	SUB/Admin			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	[illegible]	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-			75 persen	[illegible]			Melaksanakan pelayanan publik, hukum dan ketertiban, serta memenuhi pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat	-	Pegawai Timer KUTIM Kabupaten Sumateng	-	[illegible]
	[illegible]	Pengelolaan Jalan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pungutan Administrasi Umum Pemerintahan Lainnya													
			Jumlah Pemeliharaan Alat Transportasi dan Lainnya yang Dioperasikan dan Dimanfaat Pajak dan Perizinannya				40 Unit	[illegible]	Kab. Sumateng, Kecamatan, Desa/Kel, Kepulauan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melaksanakan pelayanan publik, hukum dan ketertiban, serta memenuhi pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat	-	Pegawai Timer KUTIM Kabupaten Sumateng		[illegible]
	[illegible]	Pemeliharaan Alat Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan Alat Berat													
			Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan dikalibrasi Perizinannya				70 Unit	[illegible]	Kab. Sumateng, Kecamatan, Desa/Kel, Kepulauan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melaksanakan pelayanan publik, hukum dan ketertiban, serta memenuhi pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat	-	Pegawai Timer KUTIM Kabupaten Sumateng		[illegible]
	[illegible]	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]													
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	[illegible]	-			[illegible]	[illegible]						-	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-			[illegible]	[illegible]			[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
	[illegible]	[illegible]													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	RELOKASI CAPAIAN BELUM OPD TAHUN 2023	PENAMBAH CAPAIAN TARGET AKHIR OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PENERIMA MULTI KEWUJUDAN TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persen jaringan irigasi kewenangan yang dioperasikan				4.457,00	[illegible]	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung ketahanan pangan nasional, pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kemakmuran rakyat, mengurangi resiko kemiskinan, konflik sosial, dll. Mendukung ketahanan pangan, energi, air, ekonomi, industri, dan lain-lain	-	Masyarakat yang mengelola di catalog pertanian		[illegible]
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dimanfaatkan				8.51 Km	[illegible]	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung ketahanan pangan nasional, pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kemakmuran rakyat, mengurangi resiko kemiskinan, konflik sosial, dll. Mendukung ketahanan pangan, energi, air, ekonomi, industri, dan lain-lain	-	Masyarakat yang mengelola di catalog pertanian		[illegible]
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dipelihara dan Ditingkatkan				2.31 Km	[illegible]	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung ketahanan pangan nasional, pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kemakmuran rakyat, mengurangi resiko kemiskinan, konflik sosial, dll. Mendukung ketahanan pangan, energi, air, ekonomi, industri, dan lain-lain	-	Masyarakat yang mengelola di catalog pertanian		[illegible]
	1.03.02.2.02.0016	Pengelolaan Kelembaga Gabungan Pengguna Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN SEBELUM OPD TAHUN 2025	PENGEMBANGAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BELANJA	PERKIRAAN BIAYA KEGIATAN TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											MASSENAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Pengelola Zakat/Infaq/Sedekah yang difasilitasi/dibina yang diumrohkan/haji				4 Lembaga	[illegible]	Kab. Bantaeng, Bantaeng Rayamedan, Bantaeng KabDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendanai dan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, meliputi antara lain untuk pengadaan barang dan jasa, alokasi anggaran, dan pelaporan keuangan	-	Belanja barang yang menghasilkan barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat/pihak luar dalam jangka pendek		[illegible]
	[illegible]	Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya Terkait Pelayanan Dasar													
			Jumlah Lembaga Pengelola Zakat yang Terdaftar				4 Lembaga	[illegible]	Kab. Bantaeng, Bantaeng Rayamedan, Bantaeng KabDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendanai dan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, meliputi antara lain untuk pengadaan barang dan jasa, alokasi anggaran, dan pelaporan keuangan	-	Belanja barang yang menghasilkan barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat/pihak luar dalam jangka pendek		[illegible]
	[illegible]	Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang Disusun				10 Dokumen	[illegible]	Kab. Bantaeng, Bantaeng Rayamedan, Bantaeng KabDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendanai dan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, meliputi antara lain untuk pengadaan barang dan jasa, alokasi anggaran, dan pelaporan keuangan	-	Belanja barang yang menghasilkan barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat/pihak luar dalam jangka pendek		[illegible]
3	1.03.01	PROGRAM PENGELOLAAN KINERJA PENGEMBANGAN SISTEM PENYELENGGARAAN PEMDA	Persentase Pegawai yang dapat terfasilitasi melalui SPDP (sampai dengan Pendidikan Pascasarjana dan Bukan Jenjang Pendidikan)	-			65.72 Persen	[illegible]						-	[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN AKHIR OPD TAHUN 2025	PROYEKSI CAPAIAN TARGET AKHIR OPD TAHUN 2025	SASARAN/KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PROGRAM BARU KEMENAG TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF ()
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	[illegible]	Pengawasan dan Pengendalian Dalam Penyelesaian Izin Minum (DPMA) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumbangan Rumah Sangat Mewah (A minum) (unit)	-			[illegible]	[illegible]			Mendorong [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	-	Masyarakat yang memberikan dorongan [illegible]	-	[illegible]
	[illegible]	Pembuatan Kendara Indonesia, Strategi dan Tahap Dalam Penyelesaian Izin Minum (DPMA)													
			Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategi dan Tahap Dalam Penyelesaian Air Minum (DPMA) yang disusun				4 Dokumen	[illegible]	Kab. Sumedang, Kamus Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendorong [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	-	Masyarakat yang memberikan dorongan [illegible]		[illegible]
	[illegible]	Peningkatan dalam Penyelesaian Air Minum (DPMA) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1 dll 1 sambungan	[illegible]	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendorong [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	-	Masyarakat yang memberikan dorongan [illegible]		[illegible]
	[illegible]	Pembinaan Penyediaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa													
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Sistem)				1 Desa	[illegible]	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendorong [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	Pemenuhan Standar [illegible] yang [illegible] [illegible]	Masyarakat yang memberikan dorongan [illegible]		[illegible]
	[illegible]	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN [illegible]	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN [illegible]	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN: TARGET [illegible]	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS: NASIONAL	PRIORITAS: DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN [illegible]: TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	Kab. Sumedang [illegible]	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	Kab. Sumedang [illegible]	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	Kab. Sumedang [illegible]	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	-			[illegible]	[illegible]						-	[illegible]
	[illegible]	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tinggal yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik	-			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
	[illegible]	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2022	PENARGAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ISU STRATEGIS DAERAH	PRAKIRAAN MAJU KEDEPAN TAHUN 2027	
							TARGET (%/Rp)	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											PROVINSI	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persentase Dalam Pengelolaan Air Limbah DOMESTIK (DPAL) Terpasat Dalam Pemutakhiran yang Akurasi				0,10 Ref Kota	[illegible]	Kab. Sumedang, Tanjungsmaya, Kawas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelaksanaan Ekonomi Mikro dan Non Sewah (PPLP, MPS) Minimum Akreditasi, 3 Infrastruktur Ekonomi dan pemberdayaan kemasyarakatan	Pemenuhan yang mendukung kawasan pengelolaan air limbah		[illegible]
	1.03.00.3.01.0000	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan													
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioperasikan				1 Unit	[illegible]	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Sumedang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Ekonomi mikro/ UPPE Mendukung Di Kawasan Berkualitas	Pemenuhan yang mendukung kawasan pengelolaan air limbah		[illegible]
	1.03.00.3.01.0004	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala													
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1 Desa	[illegible]	Kab. Sumedang, Kawasan Konservasi Pesisir Kab/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Ekonomi mikro/ yang Mendukung Di Kawasan Berkualitas	Pemenuhan yang mendukung kawasan pengelolaan air limbah		[illegible]
	1.03.01.2.01.0018	Pemberdayaan Sarana Pengelolaan Lumpur Tinja (PLT)													
			Kemudian Indikator Pemberdayaan Lumpur Tinja (PLT) Tertinggal				0 (P)Unit	[illegible]	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Dilarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Ekonomi mikro/ yang Mendukung Di Kawasan Berkualitas	Pemenuhan yang mendukung kawasan pengelolaan air limbah		[illegible]
	1.03.01.2.01.0020	Pendidikan dan Pembudidayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			JUMLAH Kelurahan yang Akses dan Dibudayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1 Orang	[illegible]	Kab. Sumedang, Sumedang Kecamatan, Sumedang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengunakan Kawasan Pemberdaya, dan Dengan Pemberdaya Pemberdaya, Sarana Wisata yan Kaya Pemenuhan Ekonomi penuh/ UPPE Mendukung Di Kawasan Berkualitas	Pemenuhan yang mendukung kawasan pengelolaan air limbah		[illegible]
	1.03.03.2.01.0044	Pengadaan Unit pengolahan sampah													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / Belanja Tidak Terduga	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINJA PERANGKAT DAERAH (OPD)	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2024	PENARGETAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PENDORONG BAGI PERUBAHAN TAHUN 2027	
							TARGET TAHUN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											KABUPATEN	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Sistem Sumber Air Bersih Individual (tangan, Aliran Meter Angkon dan unit pengolahan) terlayani (misalnya Deep Well Hand pump, Sanyo, dengan pengolahan kapasitas/debit 300-2000 liter/jam) dan pengolahan air/debit/ watch.				40 Rumah Tangga	4.100.000.000,00	Kab. Sumedang, Bantuan Provinsi/dan, Bantuan Kab/Desa	Lainnya, (6 Desa) (Jarak 20Km)	-	Pemanfaatan 10 unit/ alat/ sarana yang Efisiensi/ Ramah Lingkungan/ Berkualitas	Rumah tangga yang memanfaatkan mesin pengolahan air limbah		5.800.200.00
	1.03.01.2.11.0003	Penjaminan Tersedia, Kebijakan Strategi dan Tahun Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Makanan Bersama, Kelompok Warga dan Tahun Warga Pengelolaan di Lokasi Domestik (SPALD) yang Aktivitas				1 Dokumen	300.000.000,00	Kec. Sumedang, Bantuan Kab/Desa, Bantuan Kab/Desa	Lainnya, (6 Desa) (Jarak 20Km)	-	Mengembangkan Efisiensi/ Pemanfaatan dan Inovasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Diskriminatif/ Pemanfaatan Ekonomi untuk yang Efisiensi/ Ramah Lingkungan/ Berkualitas	Rumah tangga yang memanfaatkan mesin pengolahan air limbah		300.000.000
1.	1.03.06	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan/RBC & SLF Kabupaten/Kota (%)				100 Persen	11.000.000.000,00							22.447.500.000
	1.03.06.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang terbangun	-			670 Dokumen	11.000.000.000,00			Meningkatkan kesesuaian dengan informasi dan rencana tahan bangunan gedung yang berkualitas, meningkatkan kelaikannya atau, meningkatkan kinerja bangunan gedung yang sesuai dengan persyaratan administratif, teknis, perancangan, dan fungsinya	Pemanfaatan Ekonomi untuk yang Efisiensi/ Ramah Lingkungan/ Berkualitas	Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten/ Kota/	-	22.447.500.000
	1.03.06.2.01.0017	Pengelolaan/Layanan Kabupaten Gedung, atau Kepemilikan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	RELEVASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2027	
							TARGET (RP)	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (R
											PAGENDAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Bangunan Gedung yang Ada (simpan Daerah Kepulauan/Kota yang Dilaksanakan				7 Bangunan Gedung	10.000.000.000,00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dalam APBN dan Lainnya	Melengkapi sarana dengan fasilitas/alat bantu seperti kursi roda, kamar mandi/toilet, ramp, rambu/tanda evakuasi, dan lainnya	Pemenuhan Standar minimal sarana prasarana	Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten Sumedang		10.031.900.000
	1.03.06.2.01.0016	Penyelenggaraan Aplikasi sesuai Penyelenggaraan Bangunan Gedung													
			Jumlah Dokumen Aplikasi sesuai Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA Al DAN/ LAINNY DAERI	Melengkapi sarana dengan fasilitas/alat bantu seperti kursi roda, kamar mandi/toilet, ramp, rambu/tanda evakuasi, dan lainnya	-	Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten Sumedang		900.000.000
	1.03.06.2.01.0015	Penyelenggaraan Pendirikan Pendaftaran Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Serta Izin Asesmen Bangunan Gedung (SIBG), Pemanas Tanda Pendaftaran Bangunan Gedung (PTB), Izin Prinsip (IP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pendataan Bangunan Gedung													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Keluaran / Sub Keluaran	Indikator Program / Keluaran / Sub Keluaran	Target Awal Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun Lalu	Proyeksi Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Wil./Unit/OPD Bertanggung Jawab	Prakiraan Maju Rencana Tahun Lalu	
							Target (a/b)	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penyelitian Perahanan Kendaraan Gardang (HMS), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Izin Keselidikan Bangunan Gedung (SIKBG), Retribusi Tanda Pendaftaran Bangunan Gedung (TPB), Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Tim Pakar/ Ahli (TP), Pendataan dan Pendataan Bangunan Gedung Instansi (SIMBG)				21 Dokumen		Kab. Sumedang, Seluruh Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melaksanakan pengawasan terhadap bangunan gedung yang berdiri di atas tanah yang berkedudukan di atas tanah, bangunan gedung yang berdiri di atas tanah yang berkedudukan di atas tanah, dan lain-lain	-	Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten Sumedang		
2	7.03.03	PROGRAM PENETAPAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Nama Gedung Perahan Bangunan dan Lingkungan (bentuk penyelenggara)	-			83.84 (40.00)	53.539.77 1.040.00						-	07.202.305.000
	1.03.03.2.01	Penyelenggaraan Perahan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Ruang yang Perahan (bentuk penyelenggara) yang Selesai	-			70 Lokasi	53.539.77 1.040.00			Melaksanakan pengawasan terhadap bangunan gedung yang berdiri di atas tanah yang berkedudukan di atas tanah, dan lain-lain	-	Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten Sumedang	-	07.202.305.000
	1.03.03.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Perahan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2022	PENERIMAAN (Capaian) TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEMBIAYAAN						KELOMPOK SASARAN	PENGELOLAAN NILAI STRATEGIS (APBD 2023)	
							TARGET (T/R)	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (R
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Rencana Dan Teknis Pendukung Penyiapan dan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) di Kawasan Strategis Lainnya Kabupaten/Kota				4 Dokumen	[illegible]	Kab. Gorontalo, Kawasan Kawasan Strategis Nasional	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan mencakup kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya pengelolaan, pemulihan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup	-	Seluruh Desa di Kabupaten Gorontalo		[illegible]
	1.03.03.2.01.0011	Perawatan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kawasan Strategis Lainnya di Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengelolaan lingkungan dan Pengawasan				22 Kawasan	[illegible]	Kab. Gorontalo, Kawasan Kawasan Strategis Nasional	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan mencakup kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya pengelolaan, pemulihan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup	-	Seluruh Desa di Kabupaten Gorontalo		[illegible]
2	1.03.19	PROGRAM PENTELENGGARAAN JASLING	Tingkat Kewenangan Jalan Kabupaten/Kota (KM)	-			55.72 persen	[illegible]						-	[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPOSAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RASIO RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET TAHUN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (R
											PRIORITAS	CADANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.14.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota	Dokter Pemupuhan Kinerja Dalam rangka Dukungan Penyelenggaraan Jalan				60 Paket				Kewajiban penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang berkualitas, memenuhi standar dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan, dan/atau kepentingan masyarakat di sekitar jalan dan untuk kepentingan		Penggunaan Jalan di Kabupaten Bondowoso		
	1.02.14.2.01.0009	Pengelolaan Lapis Jalan													
			Jumlah Gedung Kantor Aset yang Dikelola				1 Dokumen		Kab. Bondowoso, Wilayah Kecamatan Bondowoso	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kewajiban penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang berkualitas, memenuhi standar dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan, dan/atau kepentingan masyarakat di sekitar jalan dan untuk kepentingan		Penggunaan Jalan di Kabupaten Bondowoso		
	1.02.14.2.01.0028	Pengawasan Pemasangan, Kelebihan Muatan dan Tertib Pengembangan Jaringan Jalan serta Pencegahan Tindak Pelanggaran Jalan dan Jembatan													

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN SEBELUM TAHUN BERJALAN	PENGEMBANGAN CAPAIAN TARGET AKHIR OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BESARAN RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (R
											REGIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sekurang-kurangnya Kelalaian Dinasy dan Tertib Pengembangan Jaringan Jalan serta Pemeliharaan Tanda Pengaturlancar Jalan dan Jembatan yang Dikelola				3 Kelurahan	[illegible]	Kab. Sumedang, Kantor Kecamatan, Rancaa Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mewujudkan pengaturan jaringan [illegible] dan memiliki fungsi kelas, mewujudkan kerja yang berkualitas, memberikan manfaatkan, [illegible] aan, mewujudkan [illegible] mewujudkan [illegible] mewujudkan [illegible]	-	Penggunaan jalan di Kabupaten Sumedang		[illegible]
	[illegible]	Survey Rumah Administrasi													
			Panjang Aksesibilitas yang Disurvey Kondisinya				911,30 KM	[illegible]	Kab. Sumedang, Kantor Kecamatan, Rancaa Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mewujudkan pengaturan jaringan [illegible] dan memiliki fungsi kelas, yang memungkinkan, memberikan manfaatkan, [illegible] aan, mewujudkan [illegible] mewujudkan [illegible] mewujudkan [illegible]	-	Penggunaan jalan di Kabupaten Sumedang		[illegible]
	[illegible]	Pemeliharaan Alat Jalan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Alokasi Empat Bulanan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Rasional	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Panjang jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10.000	10.000.000.000,00	Kab. Sumedang, Kimpus Kecamatan Sumedan Selatan,Kec.Cimalaka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melaksanakan pengamanan terjadi kecelakaan lalulintas dan orang kelilas kecelakaan lalulintas yang berkelanjutan memberikan kenyamanan berkendaraan dan menjaga kelangsungan arus lalulintas di ruas jalan sehingga tidak terjadi kemacetan	Menjaga ruas Jalan Nasional, Provinsi dan Jalan Desa Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Kota, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Wado, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Paseh, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Situraja, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Solokanjeruk, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Paseh, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Katapang, Kecamatan Soreang, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Katapang, Kecamatan Soreang, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Margahayu		Penggunaan jalan di Kabupaten Sumedang		10.000.000.000
	1.03.11.2.01.0002	Pemeliharaan Jalan													
			Panjang jalan yang Dalam Kondisi Mantap				0,50	0,00	Kab. Sumedang, Kimpus Kecamatan Sumedan Selatan,Kec.Cimalaka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melaksanakan pengamanan terjadi kecelakaan lalulintas dan orang kelilas kecelakaan lalulintas yang berkelanjutan memberikan kenyamanan berkendaraan dan menjaga kelangsungan arus lalulintas di ruas jalan sehingga tidak terjadi kemacetan	-		Penggunaan jalan di Kabupaten Sumedang		44.445.613.000
	1.03.11.2.11.0003	Rehabilitasi Jalan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET HASIL PERIODE RENSTRA OPD	RELEVASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KERJASAMA TAHUN 2027	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (R
											PENGERUK	CADANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	14	15	16
			Persentase jalan yang Dipelihara				41,704 KM	27.700.000.000,00	Kab. Sumedang, Kawasan Perkotaan Kawasan Tol Cisumdawu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melaksanakan pengawasan dengan melibatkan dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan serta mengontrol agar pembangunan berjalan sesuai dengan harapan	Pemeliharaan Ekosistem terhadap yang Mendukung ke Kehidupan Berkualitas	Penggunaan jalan di Kabupaten Sumedang		18.444.139.600
	1.03.10.2.01.0008	Pemeliharaan Berkala Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				3,410 Km	9.498.800.000,00	Kab. Sumedang, Kawasan Perkotaan Kawasan Tol Cisumdawu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melaksanakan pengawasan dengan melibatkan dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan serta mengontrol agar pembangunan berjalan sesuai dengan harapan	Pemeliharaan Ekosistem terhadap yang Mendukung ke Kehidupan Berkualitas	Penggunaan jalan di Kabupaten Sumedang		11.429.815.400
	1.03.10.2.01.0007	Penggantian Jembatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Awal Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja OPD Tahun 2024	Penargetan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target (13)	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Perspektif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Kewajiban	Dukungan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persentase dokumen yang ditelaah/dievaluasi				11 Dokumen	10.021.000.000,00	Kab. Sumedang, Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan dan tertib yang berkeadilan, kepatutan, kemanfaatan untuk kepentingan publik, mengutamakan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah di antara prioritas, rasional, peran serta kepentingan	-	Pengguna oleh di Kabupaten Sumedang		2.002.114.100
	1.02.10.2.01.0018	Pelayanan Administrasi													
			Persentase dokumen yang Dievaluasi				34.00 Dokumen	2.200.000.000,00	Kab. Sumedang, Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan dan tertib yang berkeadilan, kepatutan, kemanfaatan untuk kepentingan publik, mengutamakan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah di antara prioritas, rasional, peran serta kepentingan	Penyusunan Dokumen dokumen yang ditunjang ke Provinsi/ Kabupaten	Pengguna oleh di Kabupaten Sumedang		1.807.222.000
	1.03.10.2.01.0018	Pelayanan Jalan													

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BIAYA BERDASARKAN TARUN 2027	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (R
											RANGKING	CAKRAM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persenta Jalan yang Terkonektivitas				05,449 KM	05.443.154.000,00	Kab. Sumedang, Kecmatan Pamulihan, Semua Kel/Desa	(ABB, AI (ABJ)(a) (AA,AB, ED(c))	Meningkatnya pengamanan dan keamanan di jalan, meningkatnya kondisi keselamatan lalu lintas, menurunnya kondisi rawan gangguan ngguan, ngamanan, terciptanya suasana jalan yang kondusif	Terfasilitasi pembangunan Ekonomi, terbuka peluang investasi, meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengguna jalan di Kabupaten Sumedang		06.054.801.000
	1.03.10.2.01.0003	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa													
		Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi					1 KM	0,00	Kab. Sumedang, Kecmatan Sumedang Selatan, Semua Kel/Desa	(ABB, AI (ABJ)(a) (AA,AB, ED(c))	Meningkatnya pengamanan dan keamanan di jalan, meningkatnya kondisi keselamatan lalu lintas, menurunnya kondisi rawan gangguan ngguan, ngamanan, terciptanya suasana jalan yang kondusif	-	Pengguna jalan di Kabupaten Sumedang		210.000.000
	1.03.10.2.01.0002	Pembangunan/Jembatan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (R
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Panjang Jembatan yang dibangun				10 Paket	[illegible]	Kab. Bandung, Bonsai Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung pengentasan kemiskinan dan stunting melalui peningkatan akses masyarakat miskin ke layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas	Pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung ekonomi masyarakat	Penggunaan jalan di Kabupaten Bandung		[illegible]
5	5.05.01	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di setiap kabupaten/kota yang difasilitasi dengan sertifikat kompetensi terlatih kualifikasi operator/teknisi/ahli (SKK)	-			10.00 Persen	[illegible]						-	[illegible]
	5.05.01.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-			4 Pelatihan	[illegible]			-	-	-	-	[illegible]
	5.05.01.2.01.0004	Penyelenggaraan Training Asesi Assessment (TUK) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													
			Jumlah Training Asesi Assessment (TUK) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Diselenggarakan				1 Dokumen	[illegible]	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			[illegible]
	5.05.01.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	[illegible]	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		[illegible]
	5.05.01.2.01.0011	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Kelembagaan Jasa Konstruksi													
			Jumlah kunjungan Jasa Konstruksi yang Dibina dan Diawasi atas Kepatuhannya				50 Kunjungan	[illegible]	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		[illegible]
	5.05.01.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Awal Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Renstra Tahun 2027	
							Target (12)	Hasil Indikator (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Hasil Indikator (Rp
											Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Tempat Kota Kunjungan Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dibentuk dan Dimasukkan Pada Survei				1 Dokumen		Kab. Bomedberg, Semua Kecamatan, Semua Pelabuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.02.11.2.01.0015	Penyelenggaraan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Sesuai Kebutuhan Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Sesuai Tanggal Kerja Kebutuhan / Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen		Kab. Bomedberg, Seluruh Kecamatan, Semua Pelabuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.02.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Kebutuhan Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Kebutuhan Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Telah				50 Orang		Kab. Bomedberg, Seluruh Kecamatan, Semua Pelabuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.02.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan/informasi yang disampaikan	-			1 Layanan Informasi				-	-	-	-	
	1.02.11.2.02.0010	Pengelolaan Pengaduan Konstruksi dan Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi													
			Jumlah Pengaduan Konstruksi yang Ditangani				1 Pengaduan Ditangani								
	1.02.11.2.03	Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikelola				10 Dokumen		Kab. Bomedberg, Semua Kecamatan, Semua Pelabuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.02.11.2.03.0010	Pengelolaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikelola				10 Dokumen		Kab. Bomedberg, Semua Kecamatan, Semua Pelabuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.02.11.2.03.0011	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi													
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disosialisasikan				1 Layanan Informasi		Kab. Bomedberg, Semua Kecamatan, Semua Pelabuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.02.11.2.04	Penyelenggaraan Tertib Usaha, Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Penyelesaian pengaduan/pelanggaran jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (80%)	-			80 % Pelaku				-	-	-	-	
	1.02.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pelaku Pelanggaran Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diberikan Sanksi Sesuai Tertib Penyelenggaraan				80 Pelaku Pelanggaran		Kab. Bomedberg, Seluruh Kecamatan, Semua Pelabuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.02.11.2.04.0005	Pemberian Tanda Daftar, Tanda Pengembangan, dan Tanda Pemantauan Pelaku Jasa Konstruksi													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERUBAHAN (RP2)	RELOKASI CAPAIAN SEBELUM PERUBAHAN	PENINGKATAN CAPAIAN TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2025	
							TARGET TAHUN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tumbuh Usaha, Tumbuh Penyelenggaraan, dan Tumbuh Pemanfaatan Produk				60 Lembaga		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Berkualifikasi yang Dikawal dan Dievaluasi Tertib Usaha				97 Badan Usaha		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.03.11.2.04.0012	Pengelolaan Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				1 Dokumen		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
4	1.03.12	**PROGRAM PEMENUHAN/KEGIATAN PEMOTONG PAJAK**	**Persentase Pemotongan Tahapan Penyusunan ETP yang sesuai dengan ketentuan**	-			**94,00 Persen**							-	
	1.03.12.2.01.0013	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	Persentase Perumusan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang RTP	-			94,00 Persen				-	-	-	-	
	1.03.12.2.01.0013	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota													
			JUMLAH PERDA RDTR KAB/KOTA				5 Dokumen		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang													
			JUMLAH laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang				2 Laporan		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.03.12.3.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTR yang terkoordinasi dalam Kerjasama Kabupaten/Kota	-			97,00 Persen				-	-	-	-	
	1.03.12.2.02.0004	Pengawasan Pada Dasar													
			Jumlah Jalur SHP Pola Dasar				4 Pola		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		
	1.03.12.3.02.0005	Pengawasan RDTR Kabupaten/Kota													
			Jumlah rekomendasi dan laporan/ade RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN [illegible]	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN [illegible]	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN [illegible]	
							TARGET KUA	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-			[illegible]	[illegible]			-	-	-	-	[illegible]
	[illegible]	[illegible]													
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-		[illegible]
	[illegible]	[illegible]													
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-			[illegible]	[illegible]			-	-	-	-	[illegible]
	[illegible]	[illegible]													
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-		[illegible]
	[illegible]	[illegible]													
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-		[illegible]
	J U M L A H							[illegible]							[illegible]

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 ini harus melalui tahap evaluasi dan proses penyempurnaan sehingga dapat dijadikan bahan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2026.

Catatan penting yang harus diperhatikan baik dalam penyusunan rencana kerja ini disusun bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi tugas - tugas umum, tugas pelayanan kepada masyarakat dan sebagai tugas pokok dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu menyelenggarakan pelayanan dasar yang memiliki fungsi membangun infrastruktur wilayah agar dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan koordinasi secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas pembangunan daerah tersebut yang diuraikan ke dalam berbagai program dan kegiatan, serta untuk terwujudnya kinerja pembangunan daerah yang optimal, maka perlu diperhatikan **kaidah-kaidah pelaksanaan** sebagai berikut :

berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026;

2. Dokumen Renja Tahun 2026 harus dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang merupakan hasil kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2024;
4. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2026 sebagai rencana kerja yang syah setelah melalui tahapan-tahapan verifikasi dan pelaksanaan forum serta tahapan penyempurnaan untuk Rancangan Akhir Renja Dinas PUTR Tahun 2026.

Ada pun sebagai rencana tindak lanjut selanjutnya setelah melalui proses tahapan verifikasi serta penyempurnaan akan dijadikan sebagai Rencana Kerja Dinas PUTR Tahun 2026 sehingga kemudian nantinya dapat djadikan acuan Kebijakan Umum APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2026.

Sumedang Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan yang syah yang dapat dijadikan sebagai acuan teknis pelaksanaan Pembangunan atau kebijakan umum APBD yang telah dijelaskan tersebut diatas.

Sumedang, Juli 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMEDANG

Drs. ANDRI INDRA WIDIANTO, M.T.,M.Sc
NIP. 197308051992021001

TABEL 2.2

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Prosent
			Target	Realisasi	
1	3	4	5	6	7
1	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	91.50	87.54	95
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	71.35	71.4	100
3	Ketaatan terhadap RTR	Persen	72.25	75.46	104
4	Persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan	Persen	33.34	33.33	99
5	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Persen	96.12	87.08	90
6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	82.1	82.34	100
7	Persentase bangunan pemerintah dan lingkungannya yang tertata	Persen	73.75	75	101
8	Nilai sakip perangkat daerah	A	A		

TABEL 2.3

Tabel C.3

Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja	Rencana Awal				Rencana Perubahan			
						Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	Tahun Berjalan (n)				Tahun Anggaran yang Direncanakan				
						INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA (Rp)	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum dilakukan perubahan				Setelah dilakukan perubahan			
						Indikator	Target	Lokasi	Perkiraan Waktu Tahun	Indikator	Target	Lokasi	Keterangan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur	Sebelum Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur				Sesudah Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur			
						Indikator	Target	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)	Indikator	Target	Lokasi	Realisasi Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	01	1.01	0101	Program Pendidikan Anak Usia ...	Jumlah ... Pendidik ...	10 Unit		10.000.000.00	Jumlah ... Pendidik ... yang Terdidik	10 Unit		
					Kegiatan Belajar ...								
2	01	02	2.01	0201	Pengadaan Gedung Kantor ...	Jumlah ... Gedung ... yang ...	1 Unit		250.000.000.00	Jumlah Unit Gedung Kantor ... yang Digunakan	1 Unit		
					Pembangunan ...								
3	01	03	3.01		Pengadaan dan Pemasangan ...	Jumlah ... yang ...	1 Unit		1.250.000.000.00	Jumlah Unit ... yang Terpasang	1 Unit		1.250.000.000.00
4	01	04	4.01	0401	Pengadaan ...	Jumlah ... yang ...	10 Unit		100.000.000.00	Jumlah ... yang ...	10 Unit		
					Pemeliharaan ...								
5	01	05	5.01	0501	Pengadaan ...	Jumlah ... yang ...	1 Unit		75.000.000.00	Jumlah ... yang ...	1 Unit		
					Pemeliharaan ...								
6	01	06	6.01		Pengadaan dan Pemasangan ...	Jumlah ... yang ...	1 Unit		500.000.000.00	Jumlah ... yang ...	1 Unit		
					Pemeliharaan ...								
7	01	07	7.01	0701	Pengadaan ...	Jumlah ... yang ...	10 Unit		200.000.000.00	Jumlah ... yang ...	10 Unit		
					Pemeliharaan ...								
8	01	08	8.01	0801	Pengadaan ...	Jumlah ... yang ...	1 Unit		150.000.000.00	Jumlah ... yang ...	1 Unit		
					Pemeliharaan ...								
9	01	09	9.01		Pengadaan dan Pemasangan ...	Jumlah ... yang ...	1 Unit		1.000.000.000.00	Jumlah ... yang ...	1 Unit		
					Pemeliharaan ...								
10	01	10	10.01	1001	Pengadaan ...	Jumlah ... yang ...	10 Unit		50.000.000.00	Jumlah ... yang ...	10 Unit		
					Pemeliharaan ...								
11	01	11	11.01		Pengadaan dan Pemasangan ...	Jumlah ... yang ...	1 Unit		300.000.000.00	Jumlah ... yang ...	1 Unit		
					Pemeliharaan ...								
12	01	12	12.01	1201	Pengadaan ...	Jumlah ... yang ...	10 Unit		100.000.000.00	Jumlah ... yang ...	10 Unit		
					Pemeliharaan ...								
13	01	13	13.01		Pengadaan dan Pemasangan ...	Jumlah ... yang ...	1 Unit		400.000.000.00	Jumlah ... yang ...	1 Unit		
					Pemeliharaan ...								
14	01	14	14.01	1401	Pengadaan ...	Jumlah ... yang ...	10 Unit		150.000.000.00	Jumlah ... yang ...	10 Unit		
					Pemeliharaan ...								
15	01	15	15.01		Pengadaan dan Pemasangan ...	Jumlah ... yang ...	1 Unit		600.000.000.00	Jumlah ... yang ...	1 Unit		
					Pemeliharaan ...								

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Pelaksanaan sebelumnya				Usulan untuk tahun tahun berjalan/Tahun			
						Indikator/Uraian	Target	Realisasi	Realisasi fisik (%) dan keuangan (Rp)	Indikator/Uraian	Target	Uraian	Rp/Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KODE					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA / Rupiah (Rp)	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/Nama Unit/Nama Kegiatan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Utama				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
						INDIKATOR	TARGET	SATUAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	KERANGKA PENDANAAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01	01	1.01		Pengendalian dan Pengawasan Bidang Air Limbah Domestik dalam Jaringan Kabupaten/Kota	Jumlah Limbah Tangga yang Ditangani dalam Sistem Air Limbah Domestik	27 rumah tangga		25.275.000.000,00	Jumlah rumah tangga yang ditangani dalam sistem air limbah domestik	50 rumah tangga		50
	01	01	1.01	1001	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0%		500.000.000,00	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0%		
					Pembangunan SPALD-T Onsite/Fisik, Kawasan Terbangunan				150.000.000,00				
	01	01	1.01	1002	Sosialisasi dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dimanfaatkan	1 unit		150.000.000,00	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dimanfaatkan	1 unit		1
					Operasional dan SPALD-T Skala Kawasan dan Fasilitasi Sanitasi Sekolah				100.000.000,00				
	01	01	1.01	1003	Pembinaan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	3 desa		45.000.000,00	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	3 desa		3
					Pembinaan Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala				30.000.000,00				
	02	01	1.01	0028	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (m3/hari)	6 m3/Unit		20.438.000.000,00	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (m3/hari)	6 m3/Unit		20.4
					Pembangunan IPLT Unit Skala Kawasan/Komunitas				20.438.000.000,00				20.4
	03	01	1.01	0029	Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Difasilitasi/Didampingi dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1 kelompok		30.000.000,00	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Difasilitasi/Didampingi dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1 kelompok		
					Pembinaan Kelembagaan Pengelola Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				30.000.000,00				
	02	01	1.01	0030	Pemasangan Unit pengolahan sederhana	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Sanitasi Setelah Hunian Air Rinse melalukan dengan Sistem Biofil Aliran Anggota dan unit pengolahan Lanjutan sesuai unit (yang Sistem Aerasi Lengkap dengan pengolahan lanjutan/Lainnya)	1 KK		5.000.000.000,00	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Sanitasi Hunian Air Rinse melalukan dengan Sistem Biofil Aliran Anggota dan unit pengolahan lanjutan sesuai unit (yang Sistem Aerasi Lengkap dengan pengolahan lanjutan/Lainnya)	1 KK		5
	04	01	1.01	0031	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun	3 Dokumen		400.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun	3 Dokumen		4

KODE					Program/ Kegiatan/ Proyek/Rincian Jenis Kebutuhan	Rencana Kebutuhan				Posisi Anggaran yang Tersedia			
						Volume/Frek	Target	Lokasi	Perkiraan Biaya (Rp)	Kebutuhan	Target	Lokasi	Biaya (Rp)
						3	3	3	3	3	3		
1	01	08			PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI	Pembangunan Gedung Koperasi	paket		15.000.000.000,00	Pembangunan Gedung Koperasi Pasar Ir. H. Juanda Jakarta Pusat (2018)	1 paket		15.0
1	01	08	0.01		Penyelenggaraan Sidang Lokal Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi ke Luar Wilayah Kerja Koperasi (DPK) dan Rapat Lokal Luar Gedung Koperasi (Gedung	Penyelenggaraan sidang lokal di luar gedung koperasi	paket		10.000.000,00	Lembaga Pemerintahan Perusahaan Koperasi Gedung DPRD dan Wilayah Kerja Gedung DPR yang Berlaku	900 unit		9.0
1	02	08	0.02	0017	Pengadaan Fasilitas Koperasi Sehingga untuk Meningkatkan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Gedung untuk Koperasi Meningkat Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Berkelanjutan	1 Koperasi Gedung		10.000.000.000,00	Jumlah Koperasi Gedung untuk Koperasi Meningkat Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Berkelanjutan	1 Koperasi Gedung		10.0
1	04	08	0.01	0014	Pengawasan Kebijakan Kredit Pengembangan Koperasi Gedung	Jumlah Koperasi Kebijakan Jumlah Pengembangan Koperasi Gedung	1 dokument		500.000.000,00	Jumlah Koperasi Kebijakan Jumlah Pengembangan Koperasi Gedung	1 dokument		1
					Pengawasan Kredit Koperasi Gedung				500.000.000,00				
1	05	08	0.01	0015	Pengembangan Perkebunan Pemerintah Koperasi Gedung (PBK), Sertifikat Lahan Hutan Desa, Surat Ijin Usaha Kebun Koperasi Gedung (SIUKG), Pendirian Usaha Pembangunan Koperasi Gedung (PPK), Izin Usaha Jasa (IUJ), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perdagangan Koperasi Gedung (IPK), Izin Usaha Lainnya Koperasi Gedung (IUL), Izin Perdagangan Koperasi Gedung (IPK), Izin Perdagangan Koperasi Gedung (IPK), Izin Perdagangan Koperasi Gedung (IPK

KODE					Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Program/ Kegiatan	Data Dukung				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	Data terpilah & spesifik (Tahun ke-)	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	Data terpilah & spesifik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01	1.01	1.01.1	1.01.1.01	Peningkatan Pemberdayaan Petani, Nelayan Pengelola dan Lingkungan di Kabupaten Sinabung Dua Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Menengah atau Sekolah Kejuruan Negeri atau Swasta yang Ditunjuk di Kabupaten Sinabung Dua Kecamatan Kabupaten/Kota	8 Kabupaten			Jumlah Kabupaten Kinerja dan Tolok Ukur Program dan Kegiatan yang Ditunjuk di Kabupaten Sinabung Dua Kecamatan Kabupaten/Kota	7 Kabupaten		
1.	01	1.01	1.01.1	1.01.1.02	Peningkatan Pemberdayaan Petani, Nelayan Pengelola dan Lingkungan di Kabupaten Sinabung Dua Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten dan Lingkungan Kinerja Tolok Ukur Program dan Kegiatan yang Ditunjuk di Kabupaten Sinabung Dua Kecamatan Kabupaten/Kota	12 Kabupaten			Jumlah Kabupaten dan Lingkungan Kinerja Tolok Ukur Program dan Kegiatan yang Ditunjuk di Kabupaten Sinabung Dua Kecamatan Kabupaten/Kota	12 Kabupaten		
2.	02	2.01			Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kota	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen			Tingkat Pertumbuhan Jalan Kabupaten/Kota (%)	75,12 persen		
3.	03	3.01			Pengembangan Lahan Sebagai Kota	Panjang jalan kabupaten/kabupaten yang	Km			Tingkat Pertumbuhan Kinerja Objek-Ide Kegiatan Dimanfaatkan oleh	45 kawasan		
			3.01	3.01.1	Pengembangan Lahan Lahan	Jumlah Kabupaten Lahan Kota yang Dikelola	3 Kab			Jumlah Kabupaten Lahan yang Dikelola	3 Kab		
			3.01	3.01.2	Pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Tokoh Kampung Kampung dan Lahan Lahan Kota Kecamatan Lahan Kecamatan yang dan Kabupaten	Jumlah Kabupaten Kampung Kabupaten Kota Kecamatan Kabupaten Kabupaten Kota Kecamatan Lahan Kecamatan yang dan Kabupaten	3 Kab			Jumlah Kabupaten Kampung Kabupaten Kota Kecamatan Kabupaten Kabupaten Kota Kecamatan Lahan Kecamatan yang dan Kabupaten	3 Kab		
					Pengembangan Kabupaten Kota Kecamatan								
			3.01	3.01.3	Pembangunan Kabupaten Kabupaten	Panjang Jalan Kabupaten yang Dibangun	12,1,22 Km			Panjang Jalan Kabupaten yang Dibangun Dimanfaatkan	12,1,22 Km		
			3.01	3.01.4	Pembangunan Kabupaten Kabupaten	Panjang Jalan yang Dibangun Kabupaten Kota	22 Km			Panjang Jalan yang Dibangun Kabupaten Kota	22 Km		
			3.01	3.01.5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun				Panjang jalan yang dibangun			
			3.01	3.01.6	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dimanfaatkan	15,20,5 Km			Panjang jalan yang dimanfaatkan	22,7,22 Km		
			3.01	3.01.7	Pembangunan Kabupaten Jalan	Jumlah Jalan yang Dimanfaatkan Kabupaten Kabupaten	2,22,5 Km			Panjang Jalan yang Dimanfaatkan Kabupaten Kabupaten	3,3,22 Km		

KODE					Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Tahun	Lokasi	Pagu Indikasi (Rp)	Indikator	Target	Lokasi	Keterangan

KODE													

KODE					[illegible]	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
					[illegible]				[illegible]				[illegible]

TABEL 2.4

TABEL II.3

[illegible]

TAHUN [illegible]

KODE					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM		KINERJA SUB KEGIATAN		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA		Rp.			PERKIRAAN BELANJA
						TOLOK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET				TOLOK UKUR
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					[illegible]							[illegible]			
					[illegible]							[illegible]			
					[illegible]										
					[illegible]										
					[illegible]										
					[illegible]										
					[illegible]										
					[illegible]										
					[illegible]										

KODE					Uraian / Sub Kegiatan / Unsur Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota	KEGIATAN SEBELUM									
						JUMLAH PENDUDUK		KELUARGA MISKIN		INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI					

KODE					Uraian / Bidang / Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Hasil		Indikator Output		Indikator Input		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi (Kecamatan/ Desa/ Kelurahan)	Target Capaian Setelah Kegiatan Selesai	
						Tolok Ukur	Target	Keterangan	Target	Keterangan	Target				Tolok Ukur	Target

KODE					Uraian / Sebutan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA									
						CAPAIAN TAHUN LALU		KELOMPOK SASARAN PROGRAM		TARGET KINERJA					
						TOLOK UKUR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3.21.	Urusan pemerintahan daerah	Jumlah pelayanan yang berhasil diselesaikan, proses agenda/hasil yang sesuai dengan harapan dan anggaran, serta adanya sanksi/ penghargaan (apabila pelayanan/tidak, dan berdasarkan pengaduan yang ada), serta tingkat capaian (yang di inputkan)		Persentase pihak yang efektif/efisien		Jumlah pelayanan yang efektif					
					Kebudayaan										
					Kebudayaan Urusan Tugas Pembantuan - Kewenangan Lingkungan Lingkungan Hidup Daerah (PTK)										
					Kebudayaan Urusan Private - Kebudayaan Lingkungan Dinas Daerah (PTK)										
					Kebudayaan Urusan Umum Kebudayaan Lingkungan - Lingkungan (PTK)										
					Kebudayaan Urusan Kabupaten Lingkungan Kewenangan Lingkungan Hidup (PTK)										
					Kebudayaan Urusan Kabupaten Lingkungan Daerah Kewenangan Lingkungan Hidup (PTK)										
					Kebudayaan Urusan Kabupaten Lingkungan

PERANGKAT DAERAH :

BAB	Sistematika	Pokok-pokok materi	Kesesuaian		Hasil Verifikasi	Halaman
			ada	Tidak ada		
I.	PENDAHULUAN					
	1.1. Latar Belakang	*Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD dengan Renja Kl, dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.*			- Perlu ada uraian lebih rinci kondisi kinerja terakhir (akhir periode renja) Pd umumnya.	1-2
	1.2. Landasan Hukum	*Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.*			diupdate aturan2 yg baru2nya.	7
	1.3. Maksud dan Tujuan	*Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.*	✓		sdh dipaparkan secara ringkas!	
	1.4. Sistematika Penulisan	*Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.*	✓			
II.	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**					
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (disajikan dalam Tabel 2.1)	Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, **dengan pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:** a. *Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan* b. *Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;* c. *Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;* d. *Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;* e. *Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan*	✓		di sesuaikan dgn judul dan sub judul Bab!	7

		digambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.				
	2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (disajikan dalam Tabel 2.2)	Berikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008	✓		- dipertajam dg bahasa kajian/analisis! - Perlengkapi Biro yg PUPR.	
	2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	✓		Format - disesuaikan kembali dg Form verifikasi. - substansinya harus lengkap!	61.
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, (disajikan dalam Tabel 2.3)	a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan; b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda			✓ dipertajam dari a - e. !	62.
	2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Masyarakat, **(Hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah serta usulan Reses/dpr, Hibah dan Bansos)** disajikan dalam Tabel 2.4	a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan kegiatan/ usulan pemangku kepentingan tersebut diterima; b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;			Cukup detail !	27

	3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat	*Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah*	✓		✓ di perlukan Kecuali kan di Provinsi Jabar!	
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	*Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu/isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang diarahkan dengan sasaran tingkat kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029*	✓		Kecuali sini di Kabupaten!	
	3.3. Program, Kegiatan dan sub kegiatan	a. *Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah; Pencapaian SDGs; Pengentasan kemiskinan; Pencegahan NSPK dan SPM; Pemfasyagunaan potensi ekonomi daerah; Pengembangan daerah terpolar, dsb*	✓		✓ Sesuai 32-33 ✓ Tawar!	
		b. *Untuk garis besar mengenai rincian/detail program, kegiatan dan sub kegiatan,* **antara lain meliputi:** *1. Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan 2. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang terlaksana ke berbagai kewasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu) 3. Total kebutuhan dana/biaya indikatif yang dinisi menurut sumber pendanaannya*				
		c. *Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi kedunya*				
		d. *Tabel rancana program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 7-C.33/ Tabel 3.1* *(Format EXCEL Bandar Renja yang telah disempurnakan kepada BAPPEDA)*		-		
IV.	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**	a. *Rumusan Rancana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan Tahun 2026* **(hasil input SIPD-RI)**	✓			Ea.
V.	**PENUTUP**	a. *Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan*	✓			Ea.

		ditandatangani tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.				
	TABEL - TABEL					
	Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024				
	Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah				
	Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2026				
	Tabel 2.4	Usulan Program, Kegiatan sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan dan Pemangku Kepentingan Tahun 2026				
	Tabel 3.1	Rumusan Rancana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 **(Format EXCEL Ranhir Renja yang telah disampaikan kepada BAPPPPEDA)**				
	Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 **(Hasil INPUT SIPD – RI)**				

Tim Verifikasi,

28/7 2025

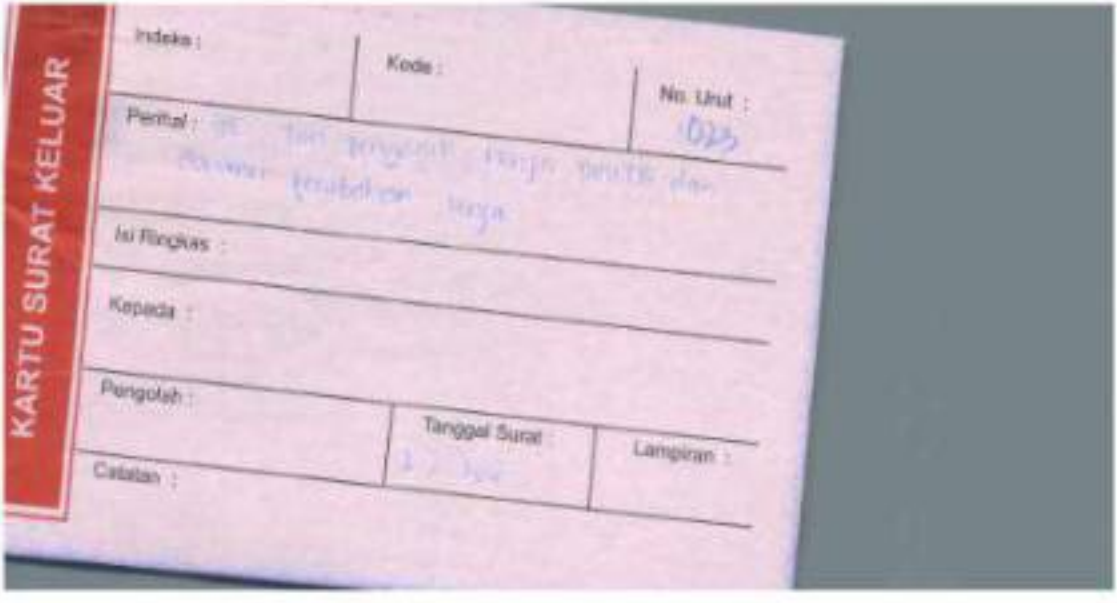
KARTU SURAT KELUAR
Indeks :
Kode :
No. Urut :
Perihal :
Isi Ringkas :
Kepada :
Pengolah :
Tanggal Surat :
Lampiran :
Catatan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang :

a. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa Pasal 125 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun dokumen rencana kerja perangkat daerah dengan Keputusan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
15. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Jembatan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru.
48. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
50. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
53. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18) ;
56. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
57. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021Nomor 17);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7);
62. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak;
63. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040;
64. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
65. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 130);
66. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 Dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana terlampir.

mempunyai tugas:

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
b. menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan; dan
c. melakukan pengendalian atas penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 02 Januari 2025

PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG,

BUDI YANA SANTOSA

PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG
SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025.

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. Ketua Tim	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
B. Sekretaris Tim	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
C. Sekretariat Tim	:	
1. Ketua	:	Wiwit Fitriani, ST (JF Perencana Ahli Muda)
Anggota	:	1. Dewi Sri Wahyuni (Kaaubag Umum) 2. Drs. Maman (Kasubag Keuangan) 3. Rustam Widarto, ST.,MT (JF Perencana Ahli Pertama) 4. Cecep Leamana, S.Sn (Tenaga Honorer Sekretariat) 5. Yusep Kurniawan (Tenaga Honorer Sekretariat) 6. Novi Suntari, S.Ab (Tenaga Honorer Sekretariat) 7. Agus Kusnarlan (Tenaga Honorer Sekretariat)
D. KELOMPOK KERJA I	:	Bidang Bina Marga
1. Ketua	:	Kepala Bidang Bina Marga
2. Anggota	:	1. Ferry Rizki Rachmawan, S.T. (Calon Teknik Jalan dan Jembatan ahli pertama)

3. Viena Auha Nurul, S.T (Pengawas Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga)
4. Rima Sufrida, ST (Tenaga Honorer Bidang Bina Marga

E. KELOMPOK KERJA II — Bidang Sumber Daya Air

1. Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Air
2. Anggota :
   1. Regi Nugraha, ST (Teknik Pengairan Ahli Pertama)
   2. Moch. Hanban Hanafi, S.T. (Pengawas Irigasi Bidang Sumber Daya Air)
   3. Dwi Klara Susi Agustine , S.T(Pengawas Irigasi Bidang Sumber Daya Air)
   4. Fitri Choerunnisa, S.T(Teknik Pengairan Ahli Pertama)

F. KELOMPOK KERJA III — Bidang Cipta Karya

1. Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya
2. Anggota :
   1. Bangun Hamdani, S.T (Pengawas Bangunan dan Gedung)
   2. Suhendra, ST (Pengawas Bangunan dan Gedung)
   3. Erlin Lestari, S.T (Analis Bangunan Gedung dan Permukiman)
   4. Sidik Permana Putra, A.Md (Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan)
   5. Ingeu Siti Nurhaliza, A.Md (Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan)

G. KELOMPOK KERJA IV — Bidang Tata Ruang

1. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang
2. Anggota :
   1. Agus Hermanto, S.Sos,MM (Analis Pemanfaatan Ruang)
   2. Irma Roselinia Noventi, S.AP M.Si (Penata Ruang Ahli Muda)
   3. Dede Suherman, S.T (Teknik penata ruang ahli pertama)
   4. Sri Sulastri, A.Md (Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang)

2. Anggota	:	1. Fery Satria Setiawan, S.Sos (Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda) 2. Gina Apriliana, A.Md (Pengelola Jasa Konstruksi) 3. Rini Crisca, A.Md (Pengelola Jasa Konstruksi)

II. URAIAN TUGAS

A. Ketua Tim mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024
2. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

B. Sekretaris Tim mempunyai tugas membantu Ketua dalam koordinasi setiap tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim

C. Ketua Sekretariat mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dengan seluruh anggota Tim;
2. Mencermati Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025;

D. Anggota Sekretariat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan persiapan perumusan dan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025;

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;

4. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
5. Memfasilitasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
6. Mempedomani Surat Edaran Bupati Sumedang tentang Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025;
7. Memfasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
8. Memfasilitasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Akhir, Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
9. Memfasilitasi penyusunan dan pembahasan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
10. Menyampaikan Dokumen rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 kepada Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang untuk diverifikasi;
11. Menyempurnakan Dokumen Rancangan awal, Rancangan, rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi;
12. Menyempurnakan Dokumen Rancangan, rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 berdasarkan hasil verifikasi;
13. Menyampaikan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 kepada Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang;
14. Menyampaikan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 kepada Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang.

f. Kelompok Kerja I Bidang Bina Marga

1. Ketua mempunyai tugas
   a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Bina Marga dengan seluruh anggota Tim;
   b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan

Tim;

c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2024 lingkup Bidang Bina Marga dengan seluruh anggota Tim;
d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Bina Marga dengan seluruh anggota Tim;
e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Bina Marga kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas

a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Bina Marga;
b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 lingkup Bidang Bina Marga;
c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Bina Marga;
d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

F. Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air

1. Ketua mempunyai tugas

a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Sumber Daya Air dengan seluruh anggota Tim;
b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 lingkup Bidang Sumber Daya Air dengan seluruh anggota Tim;
c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2024 lingkup Bidang Sumber Daya Air dengan seluruh anggota Tim;
d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Sumber Daya Air dengan seluruh anggota Tim;
e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Sumber Daya Air kepada Sekretariat.

3. Anggota mempunyai tugas

a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Sumber Daya Air;

Daerah Tahun 2025 lingkup Bidang Sumber Daya Air;
c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Sumber Daya Air;
d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

G. Kelompok Kerja III Bidang Cipta Karya

1. Ketua mempunyai tugas
   a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Cipta Karya dengan seluruh anggota Tim;
   b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 lingkup Bidang Cipta Karya dengan seluruh anggota Tim;
   c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2024 lingkup Bidang Cipta Karya dengan seluruh anggota Tim;
   d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Cipta Karya dengan seluruh anggota Tim;
   e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Cipta Karya kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas
   a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Cipta Karya;
   b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 lingkup Bidang Cipta Karya;
   c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Cipta Karya;
   d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

H. Kelompok Kerja IV Bidang Tata Ruang

1. Ketua mempunyai tugas
   a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Tata Ruang dengan seluruh anggota Tim;

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 lingkup Bidang Tata Ruang dengan seluruh anggota Tim;

c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2024 lingkup Bidang Tata Ruang dengan seluruh anggota Tim;
d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Tata Ruang dengan seluruh anggota Tim;
e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Tata Ruang kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas

a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Tata Ruang;
b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 lingkup Bidang Tata Ruang;
c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Tata Ruang;
d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

I. Kelompok Kerja V Bidang Bina Konstruksi

1. Ketua mempunyai tugas

a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Bina Konstruksi dengan seluruh anggota Tim;
b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 lingkup Bidang Bina Konstruksi dengan seluruh anggota Tim;
c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2024 lingkup Bidang Bina Konstruksi dengan seluruh anggota Tim;
d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Bina Konstruksi dengan seluruh anggota Tim;
e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Bina Konstruksi kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas

a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas

kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025lingkup Bidang Bina Konstruksi;

c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2024 lingkup Bidang Bina Konstruksi;
d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMEDANG

BUDIYANA SANTOSA